

e-ISSN 2798-9186
p-ISSN 2798-9178

Published By Citra Institute
www.citrainstitute.org



JURNAL ADHIKARI

Volume 3 Nomor 1, Juli 2025

Page 490-550

<https://www.jurnal-adhikari.id/index.php/adhikari>



Jurnal
ADHIKARI

SOCIAL | POLITIC | GOVERNMENT

JURNAL ADHIKARI

Volume 3 Nomor 1, Juli 2025

Jurnal Adhikari adalah jurnal ilmiah nasional yang mempublikasikan hasil-hasil riset dari para akademisi, dosen, peneliti, lembaga riset, mahasiswa dan masyarakat umum pada bidang **sosial, politik dan pemerintahan**.

Jurnal Adhikari terbit 4 (empat) kali dalam satu tahun dalam bentuk elektronik dan cetak pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Jurnal Adhikari terbit pertama pada bulan Juli 2021. **Mulai Volume 3 Nomor 1 Tahun 2025, Jurnal Adhikari terbit 2 (dua) kali dalam satu tahun pada Juli dan Desember.**

EDITORIAL TEAM

Editor In Chief

Asriadi, S.Sos., M.I.P

Sekretaris Dewan Redaksi

Thomas, RA

Managing Editor

Ahmad Syauqi, S.E, M.M

Editors

Agisthia Lestari, S.Sos., M.Sos

Yohanes Oci, S.I.P., M.I,P

Hasrul Harahap, M.Hum

Nawari, SH

Layout

Andrew V

IT Support & Design

Mudjiono

Diterbitkan Oleh

Citra Institute

www.citrainstitute.org

Alamat Redaksi

Bukit Golf Blok Arcadia C4/11 Bojong Nangka,

Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor 16963, Jawa Barat, Indonesia

Email : jurnal.adhikari@gmail.com

Hotline Redaksi +62 819-3279-2432

Website Jurnal : <https://www.jurnal-adhikari.id/index.php/adhikari>

JURNAL ADHIKARI
Volume 3 Nomor 1, Juli 2025

TABLE OF CONTENTS

Editorial Team	i
Table of Contents	ii
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (PPSU) DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KELURAHAN MERUYA SELATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA Maryati Karolyn; Ahmad Syauqi	490-502
DINAMIKA PENEMPATAN PEGAWAI DALAM RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU Iyos Edwarsah, Ahmad Syauqi	503-513
PENGARUH BUDAYA KERJA APARATUR DAN KOMUNIKASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PELAPORAN MASYARAKAT BERBASIS APLIKASI QJUE DI KELURAHAN TANJUNG DUREN UTARA KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT Abdul Rosid, Ahmad Syauqi	514-526
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGRAJIN TAS SULAM DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI GAMPONG DAYAH DABOH KECAMATAN MONTASIK KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI ACEH Muhammad Suhajat	527-540
ANALISIS FRAMING MEDIA TERHADAP ISU PEMINDAHAN IBU KOTA BARU DI INDONESIA Inrinofita Sari, Nurul Wahdaniyah, Asriadi	541-550

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (PPSU) DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KELURAHAN MERUYA SELATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA

Maryati Karolyn¹; Ahmad Syauqi²

¹Kantor Lurah Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta; ²Universitas Pamulang, Tangerang Selatan
email : ¹maryatikarolin@gmail.com; ²ahmadsyauqi.gem@gmail.com

Paper Accepted: 20 Juni 2025
Paper Reviewed: 24-30 Juni 2025
Paper Edited: 01-08 Juli 2025
Paper Approved: 23 Juli 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab partisipasi masyarakat menjadi rendah dengan adanya kebijakan PPSU dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di Kelurahan Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang hanya sebatas PPSU sebagai pekerja bayaran saja dan hanya tugas PPSU sajalah untuk wajib membersihkan lingkungan sehingga menimbulkan ketergantungan dan menurunkan animo masyarakat untuk aktif membersihkan wilayahnya sendiri. Selain itu, masih terdapat faktor yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Faktor tersebut dari sisi isi kebijakan, pelaksana, komunikasi, kepatuhan serta kondisi ekonomi. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan antara lain dibutuhkan peran Lurah untuk menggerakkan warganya untuk ikut kerja bakti tanpa menurunkan PPSU, diperlukan konsistensi penegakan aturan hukum misalnya dengan sanksi yang jelas dan SOP yang sudah didukung oleh aparat penegak hukum lainnya, serta dukungan dari seluruh unsur good governance yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat secara bersinergi untuk ikut menjaga kebersihan.

Kata Kunci : implementasi kebijakan, PPSU, partisipasi masyarakat

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk pelayanan publik dalam pemerintahan adalah pelayanan di bidang kebersihan. Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang besar telah menyumbangkan sampah yang besar pula. Kedudukannya sebagai daerah khusus

menjadikannya sebagai tolok ukur untuk daerah lain dalam hal penanganan sampah untuk menciptakan kota yang bersih dan ramah lingkungan.

Jakarta sebagai pusat pemerintahan diharapkan menjadi kota yang bersih dan tertata rapi. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

membuat inovasi dalam hal penanganan lingkungan yang berawal dari tingkat Kelurahan dengan mengeluarkan kebijakan yang dinamakan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Selama hampir 2 (dua) tahun berjalan, kehadiran pekerja PPSU di tengah-tengah masyarakat menjadi andalan untuk setiap kegiatan.

Pemerintah hadir memang untuk memberikan pelayanan prima dan menyediakan infrastruktur yang memadai, namun partisipasi warga juga diperlukan. Pengelolaan lingkungan menjadi tanggung jawab semua *stakeholders*, di mana pemerintah bukan pemain tunggal melainkan harus bisa memfasilitasi peran serta lainnya. Budaya gotong royong dan kerja bakti yang sudah menurun di kalangan masyarakat cenderung menjadi hilang setelah ada PPSU.

Melalui penelitian ini, maka diharapkan peneliti memperoleh kajian yang akurat tentang implementasi kebijakan PPSU serta memberikan bahan masukan berupa kajian untuk keberlanjutan suatu kebijakan. Dengan

demikian diharapkan kebijakan ini ke depan dapat lebih baik kaitannya dengan partisipasi masyarakat.

METODE PENELITIAN :

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan mengungkapkan masalah implementasi kebijakan PPSU dalam peningkatan partisipasi masyarakat, mengolah data, menganalisis, meneliti, membuat kesimpulan, dan memberi saran kemudian disusun secara sistematis sehingga implementasi kebijakan PPSU dalam peningkatan partisipasi masyarakat dapat dipahami.

Informan dalam penelitian ini akan diambil secara disengaja meliputi pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi dan memahami tentang implementasi Kebijakan PPSU dalam peningkatan partisipasi masyarakat kemudian dikembangkan sesuai dengan informasi yang penulis peroleh di lapangan (*place*) dan observasi.

Tabel
Informan Dalam Penelitian

No.	Informan	Jumlah (orang)	Alasan Pemilihan	Ket
1	2	3	4	5
1.	Unsur Bappeda Provin-si DKI Jakarta	1	Sebagai unsur perencana, dapat memberikan informasi mengenai kebijakan PPSU	Informan 1
2.	Camat Kembangan	1	Dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan kebijakan PPSU di Kecamatan Kembangan dan partisipasi warga	Informan 2
3.	Lurah Meruya Selatan	1	Sebagai pelaksana kebijakan PPSU dan manajer area di Kelurahan Meruya Selatan	Informan 3
4.	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Lingkungan Hidup Ke-lurahan Meruya Sela-tan	1	Sebagai koordinator lapangan dan pengawas pelaksanaan kebijakan PPSU	Informan 4

5.	Pekerja PPSU Kelurahan Meruya Selatan	6	Sebagai pekerja dari kebijakan PPSU yang membenahi prasarana dan sarana umum	Informan 5
6.	LMK Meruya Selatan	2	Sebagai perwakilan masyarakat dan mitra dari Pemerintah Kelurahan Meruya Selatan dapat memberikan informasi seputar pelaksanaan kebijakan PPSU dan partisipasi warga	Informan 6
7.	Warga Kelurahan Meruya Selatan	8	Dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan dan dampak dari kebijakan PPSU di tempat tinggalnya	Informan 7
Jumlah		20		

Sumber: Data Diolah Penulis, 2017

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi. Langkah-langkah yang diambil penulis dalam teknik menganalisa data yaitu reduksi data, *display* data kemudian mengambil kesimpulan dan verifikasi.

Landasan Teoritis :

1. Kepemerintahan Yang Baik

Good governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service* disebut *governance* (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “*good governance*” (kepemerintahan yang baik) (Sedarmayanti, 2003). Paradigma tata kelola pemerintahan telah bergeser dari *government* ke arah *governance* yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (Santosa, 2008). Teori tentang *good governance* sangat relevan dengan penelitian ini, di mana ada kewajiban dari pemerintah untuk menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat dan juga sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Berdasarkan definisi tersebut di atas maka kebijakan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) sebagai inovasi untuk menangani

lingkungan perlu didukung oleh peran serta masyarakat juga. Tanggung jawab akan kebersihan idealnya tidak hanya dengan mengandalkan pekerja PPSU saja, melainkan perlu peran aktif dari masyarakat sekitar.

Karakteristik *good governance* yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri menurut UNDP (Krina, 2003), sebagai berikut:

1. *Participation*. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of law*. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia.
3. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dipantau.
4. *Responsiveness*. Lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*.

5. *Consensus orientation. Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk peroleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
6. *Equity.* Yaitu memberikan kesempatan yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. *Effectiveness and efficiency.* Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8. *Accountability.* Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
9. *Strategic vision.* Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.
10. *Interrelated.* Adanya kebijaksanaan yang saling memperkuat dan terkait serta tidak bisa berdiri sendiri.

Prinsip-prinsip *good governance* yakni Partisipasi, Aturan Hukum, dan Bervisi Strategis akan digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah bagaimana upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di Kelurahan Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran

yang diinginkan (Widodo, 2007). Kebijakan PPSU tidak hanya menyangkut tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semata namun diperlukan juga adanya dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaannya.

Heglo menyebut kebijakan sebagai “*a course of action intended to accomplish some end*” atau suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu (Abidin, 2006). Istilah kebijakan menurut Anderson yaitu “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem of matter of concern*” atau serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh seorang aktor (misalnya pejabat suatu kelompok maupun lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu untuk memecahkan suatu masalah tertentu (Winarno, 2002).

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan PPSU adalah tindakan-tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau pemerintah yang di dalamnya merupakan unsur keputusan berupa upaya untuk menjadikan Kota Jakarta menjadi kota yang bersih dan ramah lingkungan.

3. Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi yang dikembangkan Warwick dikenal dengan nama “*Transactional Model*” (Warwick, 1979). Donald P. Warwick dikutip Found, implementasi kebijakan lingkungan dipengaruhi oleh isi kebijakan, penentuan tugas, proses implementasi, pelaksana, pemanfaat dan kondisi lingkungan (Found, 1992). Menurut Warwick yang dikutip Rahayu model implementasi kebijakan lingkungan yang dirancangnya dipengaruhi oleh kebijakan itu sendiri dan proses implementasi kebijakan. Variabel yang berpengaruh pada implementasi kebijakan adalah: (1) isi kebijakan, (2) struktur organisasi, (3) pelaksana (4) komunikasi. Sedang variabel lain adalah (5) sumberdaya, (6) kepatuhan dan (7) kondisi lingkungan (ekonomi, sosial, politik dan ekonomi) (Rahayu, 2005).

Berikut ini penjelasan dari variabel implementasi kebijakan publik berdasarkan model implementasi kebijakan Donald P.

Warwick, implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh:

1. Isi Kebijakan

Hal yang pertama kali dipelajari dalam implementasi kebijakan adalah isi kebijakan itu sendiri. Kebijakan yang baik seharusnya memiliki substansi atau isi yang tepat dan bijaksana sehingga dapat diimplementasikan dengan efektif. Dalam hal implementasi kebijakan PPSU, isi kebijakan harus dapat dipahami oleh semua pihak baik masyarakat, swasta maupun aparat pemerintah kelurahan sebagai pelaksana terdepan kebijakan ini.

2. Struktur Organisasi

Birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan sangat berperan menentukan efektifitas implementasi kebijakan. Birokrasi tersebut mencakup aspek struktur organisasi, pembagian kewenangan, dan koordinasi yaitu hubungan antar unit dalam organisasi yang bersangkutan dan hubungan dengan organisasi luar. Birokrasi ini penting supaya tidak terjadi duplikasi, dan petunjuk pelaksanaan atau prosedur operasi kerja dibuat secara sederhana, sehingga tidak menyulitkan aparat pelaksana tanpa mengurangi makna suatu kebijakan. Demikian pula struktur organisasi kelurahan yang memiliki Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup sebagai pelaksana delegasi kewenangan yang diberikan oleh Lurah dalam hal koordinasi PPSU di lapangan.

3. Pelaksana

Pelaksana implementasi kebijakan adalah orang atau organisasi yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan kebijakan. Pelaksana ini sangat menentukan keberhasilan proses implementasi kebijakan. Sikap dan komitmennya dalam melaksanakan kebijakan adalah sangat utama. Walaupun kebijakan bertujuan bagus, tetapi kalau pelaksana tidak mengerti atau tidak bisa menginterpretasikan dengan baik maka implementasi tidak akan berhasil. Oleh karena itu, kompetensi pelaksana merupakan hal yang penting. Pelaksana dalam kebijakan PPSU yaitu Pemerintah Kelurahan, PPSU, dan masyarakat.

4. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, ketrampilan, peraturan, dan lain-lain menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya. Komunikasi merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat sejauhmana kebijakan atau peraturan dalam hal ini adalah Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan dimengerti oleh anggota masyarakat.

5. Sumberdaya

Sumberdaya yang diperlukan meliputi:

- a. Dana sebagai sumberdaya finansial sangat penting dalam menunjang pelaksanaan kebijakan. Dana untuk pelaksanaan kebijakan publik biasanya berasal dari dana pemerintah. Dukungan dana yang kurang memadai dapat menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan. Dalam DPA Kelurahan sudah termasuk Gaji PPSU, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, Peralatan Kerja PPSU, Perlengkapan Kerja dan Seragam PPSU, serta anggaran kegiatan Kerja Bakti Lingkungan.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Maksudnya semua sarana dan prasarana yang harus tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas kebijakan. Seperti telah disebutkan di atas bahwa untuk menunjang pekerjaan PPSU dianggarkan Peralatan Kerja PPSU, Perlengkapan Kerja dan Seragam PPSU.
- c. Informasi baik berupa lisan, petunjuk atau tata cara guna mempermudah pelaksanaan kebijakan. Adanya pedoman teknis PPSU dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta 7 Tahun 2017 tentang PPSU Tingkat Kelurahan.

6. Kepatuhan dan Penegakan Hukum
Kepatuhan dalam implementasi kebijakan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kepatuhan pelaksana dalam menjalankan kebijakan dan kepatuhan kelompok sasaran dalam mematuhi kebijakan. Timbulnya ketidakpatuhan terhadap suatu kebijakan umumnya dikarenakan tidak dikenakannya sanksi yang amat berat. Kepatuhan terhadap Pergub 7 Tahun 2017 berlaku bagi Pemerintah Kelurahan, pekerja PPSU, dan masyarakat yang mana masing-masing memiliki peran berbeda.

7. Kondisi ekonomi dan sosial
Identifikasi kondisi ekonomi, sosial dan politik dilakukan dengan mempertimbangkan sumberdaya ekonomi, kondisi sosial serta karakter partisipan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan PPSU. Dukungan kondisi ekonomi Provinsi DKI Jakarta terutama melalui sektor jasa menjadi sumber terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk merealisasikan kebijakan PPSU. Kondisi sosial yang mana partisipasi masyarakat yang rendah dalam bidang kebersihan kota.

Model implementasi tidak perlu diaplikasikan sesuai apa adanya, tetapi dapat disintesis sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di mana kebijakan tersebut diimplementasikan (Wibawa, 1994). Oleh karena itu, dalam penelitian ini tidak semua faktor dari model implementasi kebijakan dapat diaplikasikan secara utuh, hanya faktor yang dianggap relevan dengan karakteristik obyek penelitian dalam implementasi kebijakan PPSU dalam peningkatan partisipasi masyarakat yang akan diaplikasikan dalam penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka variabel-variabel dari model Warwick seperti: (1) Isi Kebijakan, (2) Struktur Organisasi, (3) Pelaksana, (4) Komunikasi, (5) Sumberdaya, (6) Kepatuhan, (7) Kondisi Sosial dan Ekonomi sesuai dan relevan dengan penelitian implementasi kebijakan PPSU dalam peningkatan partisipasi masyarakat.

4. Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU)

Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan adalah pekerjaan yang perlu segera dilakukan dan tidak dapat ditunda karena dapat mengakibatkan kerugian, bahaya dan mengganggu kepentingan publik/ masyarakat di wilayah Kelurahan dan dalam rangka mempercepat berfungsinya lokasi/ prasarana dan sarana/ aset publik maupun aset daerah yang rusak, kotor dan/ atau mengganggu sesuai dengan peruntukannya (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.7 Tahun 2017). Ruang lingkup pelaksanaan PPSU meliputi:

a. Penanganan Prasarana dan Sarana Jalan

Adapun penanganan jalan yang dimaksud yaitu perbaikan jalan berlubang, pengecatan kanstin, perbaikan pembatas jalan yang rusak, dan perbaikan trotoar jalan yang rusak.

b. Penanganan Prasarana dan Sarana Saluran

Penanganan saluran meliputi perbaikan saluran rusak di jalan lingkungan, pengurusan saluran, tali air yang mampet di jalan lingkungan, serta pelaporan segera pembangunan atau aktifitas yang berpotensi mengganggu saluran termasuk penutupan saluran air kepada Perangkat Daerah seperti Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi Jakarta Barat.

c. Penanganan Prasarana dan Sarana Taman

Penanganan taman yakni pohon tumbang, pemangkasan ranting pohon yang menutupi rambu lalu lintas, lampu jalan dan yang membahayakan keselamatan, pembabatan rumput dan semak liar, pengangkutan pot-pot rusak, pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan pelaporan segera penebangan pohon pelindung tanpa izin kepada Perangkat Daerah seperti Dinas Kehutanan Kota Provinsi DKI Jakarta.

d. Penanganan Prasarana dan Sarana Kebersihan

Penanganan kebersihan seperti penyapuan jalan, pembersihan

timbunan sampah liar, pembersihan coretan liar, dan pembersihan jalan dan saluran mikro.

e. Penanganan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan Umum

Penanganan yang dimaksud adalah penanganan penerangan yang rusak membahayakan keselamatan, penanganan sementara lampu jalan lokal yang rusak, pelaporan jaringan utilitas, dan pelaporan lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi kepada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

Masa kontrak pekerja PPSU adalah 1 (satu) tahun yang dituangkan di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dibuat oleh Lurah Meruya Selatan. Jumlah PPSU Kelurahan Meruya Selatan sebanyak 82 orang (Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2331 Tahun 2016). Jumlah PPSU di setiap Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kelurahan. Dalam pelaksanaannya, Lurah menunjuk Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Lingkungan Hidup sebagai koordinator lapangan.

Pelaksanaan PPSU dilakukan setiap hari sesuai dengan pengaturan jadwal kerja dan pembagian waktu kerja yang ditetapkan. Jam kerja PPSU Kelurahan Meruya Selatan dilakukan secara *shift* yang terdiri dari *shift* I (pukul 07.00 WIB - 15.00 WIB) dan *shift* II (pukul 15.00 WIB - 23.00 WIB) dengan 6 (enam) hari kerja dalam seminggu dan 1 (satu) jam istirahat per hari. Untuk memenuhi kebutuhan internal kantor Kelurahan, Lurah dapat menugaskan maksimal 5 (lima) orang pekerja PPSU yaitu sebagai operator, pengamanan dalam, dan *cleaning service* (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.7 Tahun 2017).

Sumber informasi sebagai dasar bahan masukan untuk kegiatan PPSU dapat diperoleh dari hasil survei lapangan oleh Kelurahan Meruya Selatan, laporan secara tertulis dari masyarakat setempat, laporan melalui aplikasi Qlue Kelurahan Meruya Selatan, hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, disposisi dari pimpinan, serta pekerjaan yang telah menjadi beban kerja masing-masing bidangnya Peraturan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.7 Tahun 2017).

Merujuk dari berbagai penjelasan di atas, pada intinya PPSU mempunyai ruang lingkup, persyaratan, komposisi, sumber informasi, dan larangan yang menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan PPSU di Kelurahan Meruya Selatan.

5. Partisipasi Masyarakat

Definisi partisipasi menurut Mubyarto yaitu sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri (Ndraha, 1990). Definisi tersebut memperlihatkan bahwa seseorang untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan tidak harus mengesampingkan keperluan pribadi karena partisipasi dilakukan secara sukarela dan dalam bentuk yang bermacam-macam. Beberapa contohnya yaitu dimulai dengan tidak membuang sampah sembarangan, tetap melaksanakan kerja bakti di lingkungan dan menangani masalah yang bisa ditangani secara mandiri tanpa harus selalu mengandalkan PPSU. Sehingga nantinya tercipta hubungan kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah dalam kaitan menjaga kebersihan.

Pengertian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan PPSU meliputi: (a) menjadi saksi dalam Berita Acara Penyelesaian (Hasil) Pekerjaan Kegiatan PPSU Kelurahan Meruya Selatan; (b) kerja bakti dengan dibantu oleh pekerja PPSU Kelurahan Meruya Selatan; dan (c) bentuk partisipasi lainnya sesuai kesepakatan bersama dengan Lurah Meruya Selatan. Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat, Ketua RT dan Ketua RW memiliki peran membuat jadwal kerja bakti warga dan mengajukan permohonan bantuan pekerja PPSU Tingkat Kelurahan kepada Lurah (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2017).

Merujuk kepada berbagai pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa seharusnya partisipasi masyarakat adalah masyarakat secara mandiri bersama dengan PPSU ikut aktif berperan serta membenahi lingkungan tanpa adanya paksaan dan ikut mengawasi aktivitas yang dilakukan oleh pekerja PPSU. Di mana hubungan

antara masyarakat dengan pemerintah (dalam hal ini PPSU) sifatnya bekerja sama dalam menjaga dan membenahi lingkungan bukan melalui sebuah bentuk paksaan atau mobilisasi massa.

Kerangka Pemikiran

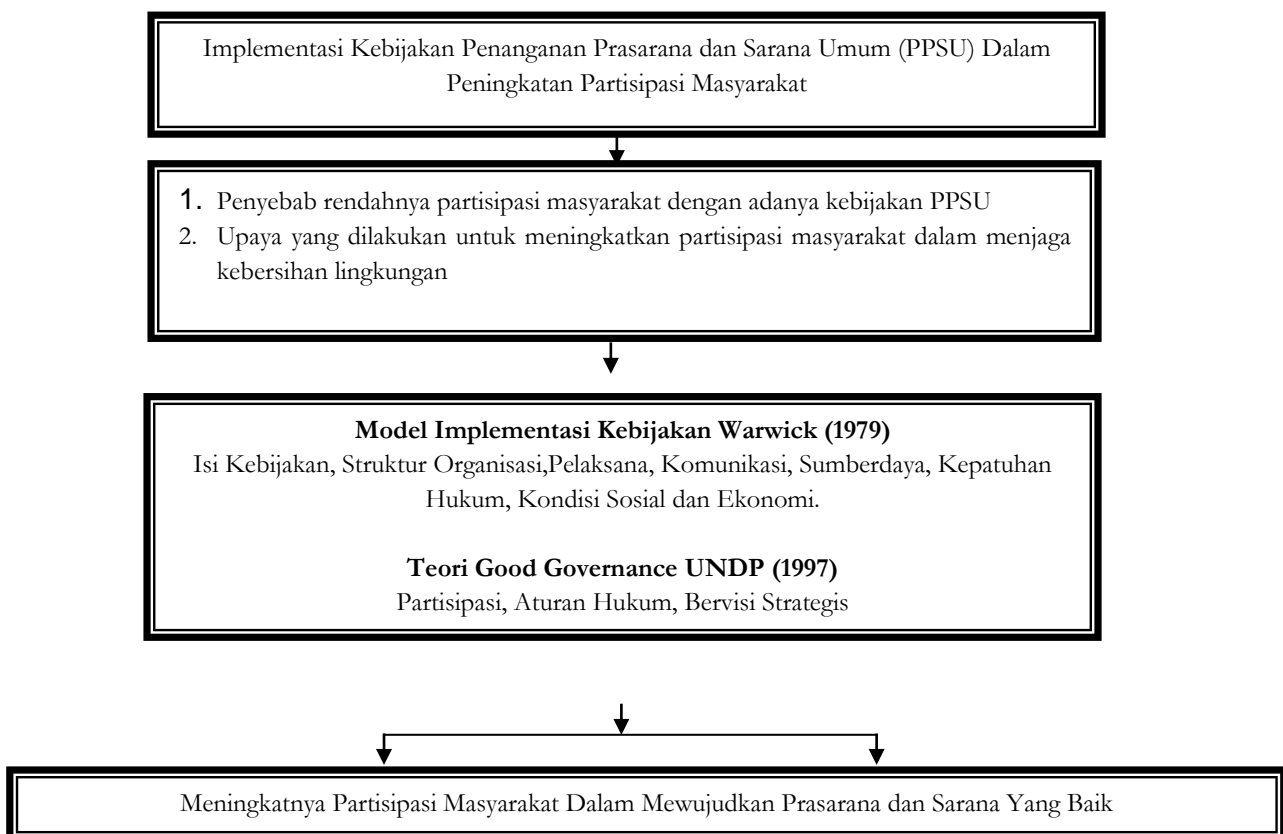
Berdasarkan model implementasi kebijakan yang telah dijelaskan maka dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus penelitian yaitu pada Implementasi Kebijakan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat. Dalam penelitian ini model implementasi kebijakan yang digunakan sebagai pedoman penulis yaitu model implementasi Donald P. Warwick.

Penulis akan menganalisis implementasi kebijakan PPSU dalam peningkatan partisipasi masyarakat yang telah ditentukan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2017

tentang PPSU Tingkat Kelurahan. Implementasi kebijakan PPSU Tingkat Kelurahan dilihat dari ruang lingkupnya meliputi penanganan jalan, saluran, taman, kebersihan dan penerangan jalan umum untuk mempecepat berfungsinya prasarana dan aset publik yang rusak, kotor dan mengganggu sesuai dengan peruntukannya.

Berhasilnya suatu implementasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Pada kondisi ideal, faktor tersebut akan mendukung implementasi. Sebaliknya pada kondisi yang tidak ideal, faktor-faktor tersebut bisa menghambat proses implementasi. Indikator yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan PPSU dalam peningkatan partisipasi masyarakat adalah isi kebijakan, struktur organisasi, pelaksana, komunikasi, sumberdaya, kepatuhan hukum dan kondisi sosial dan ekonomi. Berdasarkan kajian pustaka dan kumpulan asumsi ilmiah yang dipilih, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini secara sederhana dapat ditampilkan seperti gambar berikut:

Gambar
Kerangka Pemikiran



Sumber : Data Diolah Penulis, Tahun 2017

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator yang dapat mempengaruhi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dengan adanya kebijakan PPSU dapat dianalisis dengan melihat isi kebijakan, struktur organisasi, pelaksana, komunikasi, sumberdaya, kepatuhan hukum, dan kondisi sosial ekonomi menurut Donald P. Warwick.

1. Isi Kebijakan

Seyogyanya kebijakan PPSU tidak jadi menghilangkan fungsi pemberdayaan masyarakat karena prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu: (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi dan (3) Partisipasi Masyarakat (Krina, 2003). Kenyataan di lapangan masyarakat tidak tergerak untuk turut menjaga kebersihan, yang terjadi masyarakat jadi menganggap memang sudah sepatutnya PPSU yang bertanggung jawab akan kebersihan karena sudah di gaji oleh Pemerintah untuk membersihkan lingkungan. Jadi, isi kebijakan sudah dirancang sedemikian rupa untuk melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah. Namun, pada pelaksanaannya kebijakan PPSU justru membuat partisipasi masyarakat menjadi rendah.

2. Struktur Organisasi

Sebagai penyelenggara pemerintahan, birokrasi berperan menentukan implementasi kebijakan. Birokrasi dibutuhkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih. Terlebih di DKI Jakarta petugas yang menangani kebersihan tidak hanya PPSU yang dikenal pasukan oranye. Ada juga pasukan biru di Sudin Tata Air kemudian pasukan kuning di Sudin Bina Marga. Diperlukan batasan yang jelas untuk organisasi supaya saling mendukung dan tidak bertentangan. Pemerintah telah membuat struktur organisasi, pembagian kewenangan, koordinasi

baik yang bersangkutan maupun yang di luar dengan baik. Lebih lanjut semua batasan kewenangan dirinci dengan jelas dalam Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tentang PPSU Tingkat Kelurahan.

3. Pelaksana

Dari segi pelaksana dapat disimpulkan bahwa ada peran yang berbeda dari masing-masing pelaksana dalam kebijakan PPSU. Adapun pelaksana terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Pemerintah ada dari Bappeda, Kecamatan, Kelurahan sampai dengan para pekerja PPSU. Sampai dengan saat ini yang menjadi pelaksana kebijakan PPSU hanya dari pekerja PPSU saja, belum ada partisipasi masyarakat secara aktif dalam menjaga dan membersihkan lingkungan.

4. Komunikasi

Komunikasi menjadi salah satu faktor yang penting dan tolok ukur untuk melihat sejauhmana kebijakan PPSU telah dimengerti oleh masyarakat. Dari segi komunikasi dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya pesan yang wajib disampaikan dari pemerintah kepada masyarakat bahwa kebijakan PPSU tetap harus didukung dengan peran serta aktif masyarakat. Peran serta dapat berupa tindakan tidak buang sampah sembarangan dan tidak melihat PPSU hanya sebagai satu-satunya pelaku yang wajib menjaga dan membersihkan lingkungan.

5. Sumberdaya

Sumberdaya meliputi dana, sarana dan prasarana yang memadai, dan informasi untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan. dukungan sumberdaya terhadap kebijakan PPSU sangat memadai. Adapun sumberdaya termasuk di dalamnya gaji PPSU sebesar UMP, tunjangan

kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, peralatan perlengkapan dan material kerja yang sudah dianggarkan dan juga media laporan pengaduan masyarakat dalam bentuk WA atau aplikasi Qlue memberikan dampak negatif kepada masyarakat untuk semakin mengandalkan PPSU dalam menjaga kebersihan lingkungan.

6. Kepatuhan dan Penegakan Hukum
Kepatuhan dalam implementasi kebijakan PPSU dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kepatuhan pelaksana (Pemerintah dan pekerja PPSU) serta kepatuhan masyarakat. Jadi, diperlukan sanksi, prosedur yang jelas dan dukungan agar terlaksananya kepatuhan hukum utamanya dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
7. Kondisi Sosial Ekonomi
Implementasi kebijakan PPSU dari segi kondisi sosial ekonomi berdampak pada semakin berkurangnya interaksi sosial masyarakat berupa kerja bakti. Namun secara ekonomi, membuka peluang lapangan pekerjaan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan menggunakan prinsip-prinsip *good governance* seperti partisipasi, aturan hukum, efektifitas dan efisiensi, serta bervisi strategis menurut UNDP.

1. Partisipasi
Diperlukan kesadaran masyarakat akan rasa memiliki terhadap wilayahnya dengan cara aktif ikut kerja bakti bersama-sama membersihkan lingkungannya. Selain itu, dibutuhkan juga peran aktif Lurah beserta jajarannya untuk menjaga tradisi kerja bakti dan menggerakkan masyarakat untuk turun tanpa harus menunggu PPSU saja. Dengan demikian tercipta pemerintahan yang baik, kota

modern yang tertata rapi sesuai dengan visi kota Jakarta.

2. Aturan Hukum
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah mengadakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pelaku pembuang sampah liar. Ketika OTT dilakukan, terdapat kendala yaitu dari unsur pengaduan yang sepertinya masih belum sinergi dengan Pemda kaitannya dengan unsur pembiayaan operasional pengadilan. Akhirnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya sebatas melakukan pembinaan kepada pelaku pembuang sampah liar tersebut berupa Surat Pernyataan agar tidak mengulangnya lagi. Jadi, upayanya adalah perlunya konsistensi dan dukungan penegakan aturan hukum untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku pembuang sampah.
3. Bervisi Strategis
Sebuah visi diperlukan sebagai pandangan jauh ke depan, sebagai arah agar dapat bekerja secara konsisten dan inovatif. Adapun visi Kota Jakarta yaitu Jakarta baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Visi tersebut harus didukung oleh seluruh unsur yang terdapat pada konsep *good governance* yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, tentunya tidak terlepas dari masyarakat yang berkebudayaan. Berkebudayaan artinya sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan seperti slogan yang kerap ada di setiap Kantor Pemerintah yang berbunyi “Kampung Kite Kalo Bukan Kite Nyang Ngurusin Siapa Lagi?” Visi untuk mewujudkan wilayah yang tertata rapi harus dipahami dan didukung secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat.

Penutup

Melihat Implementasi Kebijakan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Analisis teori Warwick terhadap penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dengan adanya kebijakan PPSU yaitu masih terdapat faktor yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan yaitu dari sisi isi kebijakan, pelaksana, komunikasi, kepatuhan serta kondisi ekonomi. Penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dengan adanya kebijakan PPSU yaitu pemahaman masyarakat yang hanya sebatas PPSU sebagai pekerja bayaran saja dan hanya tugas PPSU sajalah untuk wajib membersihkan lingkungan sehingga menimbulkan ketergantungan dan menurunkan animo masyarakat untuk aktif membersihkan wilayahnya sendiri. Tujuan untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan tertata rapi menjadi sulit dikarenakan pola pikir masyarakat itu sendiri.
2. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan antara lain:
 - a. Peran Lurah untuk menggerakkan partisipasi warga dalam kegiatan kerja bakti sehingga masyarakat ikut turun dan menahan PPSU untuk tidak mengambilalih kerja bakti namun cukup dengan membantu pengangkutan sampahnya saja yang merupakan hasil kerja dari masyarakat.

- b. Diperlukan konsistensi penegakan aturan hukum misalnya dengan sanksi yang jelas dan SOP yang sudah didukung oleh aparat penegak hukum lainnya.
- c. Visi Jakarta sebagai Kota Modern Yang Tertata Rapi harus mendapatkan dukungan dari seluruh unsur *good governance* yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

Saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Diperlukan kebijakan berupa aturan yang jelas untuk mengatur tingkat partisipasi masyarakat contohnya bilamana perlu dijatuhkan sanksi bagi warga yang tidak mengikuti kerja bakti di wilayahnya. Baik itu sanksi administratif maupun sanksi sosial agar masyarakat mau berubah sehingga secara jangka panjang mengembalikan tradisi kegotongroyongan.
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mengevaluasi kebijakan PPSU sehingga dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi dapat terwujud kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.
3. Penulis mengharapkan dilakukan penelitian lebih lanjut dan evaluasi secara berkala terkait masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan PPSU sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

menjaga kebersihan lingkungan di Kota Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2008, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Abidin, Said Zainal, 2006, *Kebijakan Publik*, Suara Bebas, Jakarta.
- Agustino, Leo, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Budiati, Lilin, 2012, *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia, Semarang.
- Found, W.C., 1992, *Implementasi Program-Program Pengelolaan Lingkungan: Suatu Kerangka Untuk Analisis, Prosiding Hasil Lokakarya Pelaksanaan Kebijakan dan Program*, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup ITB, Bandung.
- Jackson, Karl D., 1981, *Urbanisasi dan Pertumbuhan Hubungan Patron-Klien; Perubahan Kualitas Komunikasi Interpersonal di Sekitar Bandung dan Desa-Desa di Jawa Barat*, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta.
- Keputusan Gubernur Nomor 2331 Tahun 2016 tentang Penetapan Jumlah Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan.
- KPK, 2010, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, KPK, Jakarta.
- Krina, Lalolo, 2003, *Indikator Dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*, Bappenas, Jakarta.
- Luankali, Bernandus, 2007, *Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan*, Amelia Press, Jakarta.
- Mirah Sakethi, Team, 2010, *Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta*, PT. Mirah Sakethi, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nazir, Moh., 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ndraha, Taliziduhu, 1990, *Membangun Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nugroho, Riant, 2004, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Media Elex Komputindo, Jakarta.
- Nugroho, Riant, 2008, *Public Policy*, Elek Media Komputindo, Jakarta.
- Nugroho, Rian, 2011, *Public Policy*, Elek Media Komputindo, Jakarta.
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan.
- Pudji Rahayu, Sri. 2005. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri (Kasus Industri Pelapisan Logam Di Jakarta Timur)*. Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Santosa, Pandji, 2008, *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, PT. Reflika Aditama, Bandung
- Sastropoetra, Santoso, 1986, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Displin Dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Sedarmayanti, 2003, *Good Governance Kepemerintahan Yang Baik Bagian Pertama Edisi Revisi*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Soetrisno, Lukman, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Subarsono, AG., 2005, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung.
- Usman, Sunyoto, 2004, *Sosiologi: Sejarah, Teori dan Metodologi*, Center for Indonesian Research and Development (CIRED), Yogyakarta.
- Warwick, Donald P., 1979, *Integrating Planning And Implementation: A Transactional Approach*, Harvard Institute For International Development, Discussion Paper No.63.
- Wibawa, Samodra, dkk., 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widodo, Joko, 2007, *Analisa Kebijakan Publik*, Bayu Media Publishing, Malang.

Winarno, Haryo, Deni Zulkadi Pradono, dan Miming Diharja, 2002, *Pemikiran dan Praktek Perencanaan Dalam Era Transformasi Di Indonesia*, Departemen Teknik Planologi ITB, Bandung.

DINAMIKA PENEMPATAN PEGAWAI DALAM RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU

Iyos Edwarsah¹; Ahmad Syauqi²

¹Magister Administrasi Pemerintahan Daerah Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta; ²Universitas Pamulang, Tangerang Selatan
email : ¹iyosedwarsah@gmail.com, ²ahmadsyauqi.gem@gmail.com

Paper Accepted: 20 Juni 2025
Paper Reviewed: 24-30 Juni 2025
Paper Edited: 01-08 Juli 2025
Paper Approved: 23 Juli 2025

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Mukomuko merestrukturisasi organisasi perangkat daerahnya sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Berbagai dinamika terjadi sebagai akibat diterapkannya Peraturan Pemerintah ini. Dinamika penempatan pegawai dalam restrukturisasi organisasi perangkat daerah semakin rumit karena terbatasnya Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai dinamika yang berkenaan dengan penempatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Mukomuko, hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam menempatkan pegawai tersebut, serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk meminimalisir bahkan menghilangkan hambatan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan pada 2 (dua) tempat yakni pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko. Adapun wawancara dilakukan pada Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kabid Mutasi, Pengembangan Karir dan Informasi Pegawai serta Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko yang diucapkan secara langsung kepada narasumber. Sedangkan dokumentasi lebih kepada pengumpulan data yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika penempatan pegawai dalam restrukturisasi organisasi perangkat daerah lebih menekankan kepada besarnya politisasi organisasi sebesar 30% Pegawai Negeri Sipil titipan serta 70% Pegawai Negeri Sipil ditempatkan berdasarkan kompetensi dan kualifikasinya. Adapun struktur pada organisasi perangkat daerah yang baru dirasa lebih ramping dibandingkan struktur yang sebelumnya. Perampingan organisasi ini semakin baik karena meminimalisir anggaran pengeluaran untuk belanja pegawai (tunjangan), namun di sisi lain banyak Pegawai Negeri Sipil yang tidak mendapat jabatan struktural sebagai akibat minimnya jabatan struktural yang tersedia.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Penempatan Pegawai, Jabatan Struktural, Restrukturisasi

PENDAHULUAN

Salah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 18 Ayat 7 Undang-undang Dasar 1945 berbunyi “Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang”. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara eksplisit tercantum dalam BAB VI Undang-undang Dasar Tahun 1945, dimana Pemerintah Daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah juga berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan di daerahnya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang digunakan oleh penyelenggara pemerintah daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Dalam Pasal 208 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah yang dimaksud, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.

Hubungan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bersifat koordinatif dan fungsional. Guna memperjelas peran, tugas pokok serta fungsi perangkat daerah, secara khusus pemerintah mengeluarkan produk hukum berbentuk Peraturan Pemerintah untuk mengaturnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas, Badan, Inspektorat dan Kecamatan. Kabupaten Mukomuko merupakan satu dari sekian banyak daerah tertinggal di Republik Indonesia. Banyak faktornya, salah satunya adalah jumlah PNS pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang dianggap

jumlahnya sangat terbatas. Kekurangan pegawai dapat sinyalir dari ketidaksesuaian antara penempatan pegawai terhadap jabatan yang ada. Keberhasilan suatu program pada Pemerintah Daerah dapat dilihat sejauh mana relevansi korelasi antara jabatan serta penempatan pegawai berdasarkan kualifikasinya.

Permasalahan yang kerap terjadi adalah ketidaksesuaian antara kebijakan penempatan pegawai dengan prinsip-prinsip profesionalitas dan regulasi yang berlaku. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah perlunya kesesuaian antara latar belakang pendidikan serta kecakapan pegawai dengan jabatan yang ditempati. Namun pada kenyataannya, praktik yang terjadi menunjukkan bahwa penempatan pegawai kerap kali lebih dipengaruhi oleh kedekatan personal dengan pihak yang berwenang, bukan atas dasar kompetensi. Akibatnya, kualitas kinerja para pejabat menjadi tidak optimal. Selain itu, terdapat pula indikasi kuat bahwa proses penempatan pegawai turut dipengaruhi oleh kepentingan politis, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam manajemen sumber daya aparatur. Hal ini diperparah dengan pola penempatan pegawai yang belum sepenuhnya mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Mukomuko dinilai masih belum secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip meritokrasi dalam kebijakan sumber daya manusianya, khususnya dalam konteks implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada penempatan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, dan secara khusus mengkaji dinamika yang terjadi dalam proses tersebut sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi perangkat daerah. Penelitian ini juga akan melihat sejauh mana pihak-pihak terkait memainkan perannya dalam proses penempatan tersebut. Dari permasalahan yang ada, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana dinamika penempatan pegawai berlangsung dalam proses restrukturisasi organisasi di Kabupaten Mukomuko? Kedua, hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan

restrukturisasi berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016? Dan ketiga, upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk menetralsir berbagai dinamika yang muncul dalam proses penempatan pegawai tersebut?.

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika penempatan pegawai dalam restrukturisasi organisasi, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan tersebut. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembenahan tata kelola kepegawaian yang lebih profesional dan berlandaskan hukum di Kabupaten Mukomuko.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan interaksi antara peneliti dengan apa yang diteliti sangat erat dan tidak terpisahkan. Peneliti menganalisis berbagai permasalahan terhadap dinamika penempatan pegawai dalam restrukturisasi organisasi terhadap peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Data penelitian terdiri dari jumlah PNS di Kabupaten Mukomuko, jumlah OPD beserta data jabatan struktural di Pemerintah Kabupaten Mukomuko, dan data besaran jumlah jabatan struktural yang tersedia. Peneliti memilih untuk menggunakan teknik non probability sampling. Dimana sumber data didapat dari hasil wawancara orang yang sudah ditentukan dari jauh hari sebelumnya. Dalam hal penempatan pegawai, informan yang dirasa paling mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan dinamika penempatan pegawai adalah kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten mukomuko. Ditambah snowball sampling merupakan teknik pengumpulan sampel yang awalnya sedikit namun perlahan menjadi banyak. Hal ini dilakukan jika sumber data masih dianggap sedikit, maka akan dicari lagi sumber data yang lain. Pada penelitian ini penentuan informan pokok berfungsi sebagai aset sumber data utama.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah orang yang paling banyak mengetahui dan terlibat langsung dalam kegiatan penempatan pegawai. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat menghindari data-data yang buruk sehingga akan menghasilkan data yang objektif, valid dan reliabel. Berikut ini adalah langkah-langkah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, antara lain :

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan pada suatu kejadian di lapangan, selanjutnya dari pengamatan tersebut dilakukan pencatatan secara sistematis terhadap gejala, data dan fakta yang diteliti secara langsung. Dalam melakukan penelitian terhadap dinamika penempatan pegawai, peneliti harus melakukan pengamatan dari berbagai sudut pandang. Penempatan pegawai adalah hal sangat dinanti oleh sebagian besar PNS. Menjadi suatu kebahagiaan jika pribadinya dipromosikan oleh yang berwenang. Namun bisa jadi sebaliknya jika PNS tersebut justru dipindahkan ke tempat yang jauh di luar prediksinya. Dinamikanya sangat beragam, butuh observasi berulang kali untuk memastikan bahwa penempatan pegawai ini benar-benar menghasilkan dinamika yang amat kompleks.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan guna mendapat data dan keterangan yang menunjang penelitian. Seperti yang dinyatakan Lexy Moleong (2012:186) bahwa "Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee)". Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang sangat efektif karena bisa bertatap muka secara langsung dengan informan. Melihat secara jelas bagaimana ekspresi wajah serta gesture lain yang memungkinkan peneliti untuk mendapat informasi baru.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencatatan data yang bersumber dari arsip-arsip, surat-surat yang diperlukan dalam penelitian serta

dokumen-dokumen atau data-data yang berhubungan dengan data penelitian yaitu data tentang Dinamika Penempatan Pegawai dalam Proses Restrukturisasi Organisasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Adapun menurut Bambang Rustanto (2015:60) menyatakan bahwa “Sumber data penelitian dokumentasi antara lain: 1) Dokumen Resmi dan Pribadi, seperti surat keputusan, surat perintah, notulen rapat dan lain sebagainya; 2) Dokumen Primer dan Sekunder. Dokumen primer merupakan dokumen yang langsung ditulis/dibuat oleh orang yang mengalami peristiwa yang didokumentasikan. Sedangkan dokumen sekunder adalah jika peristiwa yang didokumentasikan dilaporkan kepada orang lain, selanjutnya ditulis oleh orang lain tersebut”.

Proses analisis data menggunakan Sugiyono dalam Bambang Rustanto (2015:71) menyatakan bahwa “analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”. Paling penting juga adalah teknik pengujian keabsahan data sangat diperlukan dalam penelitian sosial yang menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian yang bersifat empiris, informasi yang diberikan maupun perilaku masing-masing informan mempunyai makna sehingga tidak dapat langsung diterima begitu saja. Berdasarkan hal tersebut, setiap data yang diperoleh itu harus dilakukan pengujian keabsahan data untuk mengetahui kebenarannya. Penelitian ini mengambil lokasi di Pemerintah Kabupaten Mukomuko, khususnya di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko. Peneliti memilih lokasi ini dengan pertimbangan bahwa peneliti merupakan mahasiswa tugas belajar yang dibiayai oleh pemerintah kabupaten Mukomuko. Ditambah pemerintah kabupaten Mukomuko

adalah kabupaten yang baru saja dimekarkan, sehingga perangkat daerahnya dirasa masih belum mumpuni dibandingkan daerah lain di Provinsi Bengkulu.

Landasan Teoritis :

1. Organisasi

Stephen P. Robins (2015:4) menyatakan bahwa “Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan”. Orang-orang di dalam sebuah organisasi mempunyai suatu keterikatan yang terus menerus. Rasa keterikatan ini tentunya bukan berarti keanggotaan seumur hidup. Hal ini dimaksudkan seberapa banyakpun kegiatan yang berada di suatu organisasi, perubahan maupun dinamika yang terjadi, para anggota akan tetap mengikuti serta berpartisipasi secara teratur guna mencapai tujuan bersama organisasinya. Tujuan organisasi bisa jadi dilaksanakan dengan beragam cara dan beraneka sikap oleh anggota organisasi (secara individu). Akan tetapi, tujuan organisasi akan lebih efisien dicapai jika dilaksanakan dengan bersama-sama atau melalui usaha kelompok.

Pada dasarnya, organisasi dirancang untuk mengetahui jumlah pembagian kerja berdasarkan tugas dan fungsi. Struktur organisasi yang dibuat sebenarnya hanya penegasan secara formal untuk mencapai koordinasi antar pola-pola interaksi. Ermaya Suradinata (2015:24) menyatakan bahwa “Ada 4 (empat) komponen dasar sebagai kerangka untuk mendefinisikan organisasi, yaitu :

- 1) Struktur organisasi menggambarkan pembagian tugas dan tanggung jawab kepada individu maupun bagian-bagian pada suatu organisasi;
- 2) Struktur organisasi menggambarkan hubungan pelaporan yang ditetapkan secara resmi dalam suatu organisasi;
- 3) Struktur organisasi menetapkan mengelompokkan individu menjadi bagian dan organisasi, dan pengelompokan bagian-bagian tersebut menjadi bagian suatu organisasi yang utuh;
- 4) Struktur organisasi menetapkan sistem hubungan dalam organisasi

memungkinkan tercapainya komunikasi, koordinasi dan pengintegrasian segenap kegiatan organisasi, baik vertikal maupun horizontal”.

Tipologi secara umum dapat dikatakan sebagai pengetahuan secara sistematis tentang tipe yang dipakai untuk menganalisis suatu organisasi. Sedangkan tipologi organisasi lebih menitikberatkan kepada pengklasifikasian suatu organisasi berdasarkan tipenya.

Strategi yang dilakukan guna pengembangan organisasi, seringkali dilakukan untuk meningkatkan keefektifan organisasi yang ada. Organisasi yang efektif sebagai organisasi yang mencapai manfaatnya dengan memenuhi keinginan dan kebutuhan stakeholder, menyesuaikan sumberdaya organisasi dengan peluang, mengadaptasi perubahan lingkungan secara fleksible dan menciptakan budaya guna meningkatkan komitmen, kreatifitas, nilai bersama serta keyakinan bersama. Seperti yang dinyatakan Labolo (2015:8) bahwa “Dalam hal diskresi, suatu tindakan pemerintah setidaknya didasarkan pada 2 (dua) pendekatan utama yaitu Decision of Logic dan Decision of Will. Pendekatan Utama (Decision of Logic) didasarkan pada pertimbangan hukum, sedangkan pendekatan kedua merujuk pada pertimbangan politik”.

2. Birokrasi

Feisal Tamin (2004:73) menyatakan bahwa “Birokrasi adalah suatu struktur otoritas atau organisasi yang didasarkan atas peraturan-peraturan yang jelas dan rasional serta posisi-posisi yang terpisahkan dari orang yang mendudukinya, sesungguhnya mewakili kepentingan rakyat maupun pemerintah dengan fungsi koordinasi, pendisiplinan dan pengendalian proses pemerintahan dengan kuat. Kuat dalam arti birokrat yang profesional dan memiliki akuntabilitas tinggi kepada rakyatnya”. Menurut Max Weber dalam Budi Setiyono (2016:51) dinyatakan bahwa “Otoritas legal menjadi dasar adanya birokrasi rasional. Adapun dalil otoritas legal terbagi atas :

- 1) Tugas-tugas pejabat diorganisasikan atas dasar yang diatur dan berkelanjutan;

- 2) Tugas dibagi dalam tahap-tahap yang berbeda dari segi fungsional yang masing-masing dilengkapi kewenangan (otoritas) dan sanksi yang sesuai dengan tingkatannya;
- 3) Jabatan-jabatan diatur secara hierarkis;
- 4) Aturan-aturan yang mengatur pekerjaan bisa bersifat teknis maupun legal;
- 5) Sumber-sumber institusi (fasilitas, kewenangan) dibedakan dengan sumber-sumber individu secara pribadi;
- 6) Pemegang jabatan tidak dapat mengambil jabatannya sebagai milik pribadi;
- 7) Administrasi didasarkan pada dokumen tertulis;
- 8) Sistem kekuasaan legal (legal authority) dapat memiliki banyak bentuk, tetapi bentuk yang paling murni adalah staf administrasi birokratis”.

3. Promosi, Mutasi dan Demosi

Promosi secara singkat adalah pemindahan pegawai dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lebih tinggi posisinya. Dimana pegawai tersebut pasti akan menerima tanggungjawab yang lebih besar serta penghasilan yang lebih baik dari sebelumnya. Promosi adalah hal sangat dinanti oleh setiap pegawai. Ketika mendapat posisi pekerjaan yang lebih baik, motivasi seorang pegawai pasti akan meningkat karena merasa lebih dihargai apa yang sudah ia kerjakan. Adapun menurut Malayu Hasibuan (2014:102) menyatakan bahwa “Mutasi adalah suatu perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang dilakukan secara vertikal (promosi dan demosi) maupun horizontal di dalam suatu organisasi”. Artinya, mutasi adalah suatu perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan yang lain. Jika jabatannya naik makanya disebut promosi, sebaliknya disebut demosi. Mutasi dapat disimpulkan sebagai perpindahan yang stagnan, tidak naik maupun turun dalam jabatannya. Demosi juga bagian dari mutasi, yakni perpindahan pegawai pada jabatan yang lebih rendah. Adapun menurut Sondang P. Siagian (2016:172) menyatakan bahwa “Seseorang karena berbagai pertimbangan mengalami penurunan pangkat

atau jabatan dan penghasilan serta tanggung jawab yang semakin kecil. Dapat dipastikan bahwa tidak ada seorang pegawaiipun yang senang mengalami hal ini”.

4. Rekrutmen Sumber Daya Manusia

Andrew E. Sikula dalam Anwar Mangkunegara (2013:33) menyatakan bahwa “Recruitment is the act of process of an organization attempting to obtain additional manpower for operational purpose. Recruiting involves acquiring further human resources to serve as institutional input”. Secara umum rekrutmen dapat diartikan sebagai tindakan atau proses dari suatu usaha organisasi untuk mendapatkan tambahan pegawai untuk tujuan operasional dengan melibatkan sumber daya manusia yang mampu berfungsi sebagai input lembaga. Hal tersebut dilakukan mulai dari identifikasi dan evaluasi sumber-sumber rekrutmen, menentukan banyaknya kebutuhan pegawai, proses seleksi, penempatan dan orientasi pegawai. Sondang P. Siagian (2016:103) menyatakan bahwa “Kendala terhadap proses rekrutmen terbagi menjadi 3 (tiga) yakni kendala yang bersumber dari dalam organisasi yang bersangkutan, kebiasaan mencari tenaga kerja sendiri serta faktor eksternal organisasi yang bersumber dari lingkungan dimana organisasi bergerak”.

5. Teori dan Konsep Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Sondang P. Siagian (181:2016) menyebutkan bahwa “Sumber Daya Manusia adalah sumber daya terpenting dalam suatu organisasi”. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa besarnya investasi suatu organisasi terletak pada pemanfaatan sumber daya manusia terhadap bidang yang menanganinya. Bidang sumber daya manusia, memiliki peran teramat penting guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada suatu organisasi. Seringkali sulit membedakan antara pelatihan dan pengembangan terhadap sumber daya manusia pada suatu organisasi. Singkatnya bisa dikatakan bahwa pelatihan cenderung dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kemampuan seorang pegawai dalam melakukan tugas yang diberikan sekarang, sedangkan pengembangan adalah hal yang lebih berorientasi pada peningkatan kemampuan seorang pegawai dalam

produktivitas kerja pegawai tersebut di masa yang akan datang.

6. Eksistensi Pegawai Negeri Sipil Menurut Kebijakan Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Negeri Sipil tersebut diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian, lalu diberikan tugas dalam suatu jabatan pemerintahan. Selain tugas dalam suatu jabatan pemerintahan, ASN juga dapat diberikan tugas negara lainnya dengan diberikan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warganegara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Lain halnya dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Suatu cara dalam menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan andal perlu adanya suatu perencanaan dalam menentukan PNS yang akan mengisi pekerjaan yang ada dalam OPD Pemerintah bersangkutan. Keberhasilan dalam pengadaan tenaga kerja terletak pada ketepatan dalam penempatan PNS baru maupun PNS lama pada posisi jabatan baru. Proses penempatan merupakan suatu proses yang sangat menentukan dalam mendapatkan PNS yang kompeten yang dibutuhkan OPD Pemerintah, karena penempatan yang tepat dalam posisi jabatan yang tepat akan dapat membantu OPD Pemerintah dalam mencapai tujuan. Adapun pengertian penempatan menurut Sondang Siagian (2016:169) menyatakan bahwa “Penempatan tidak hanya berlaku bagi karyawan baru, akan tetapi

berlaku pula bagi pegawai lama yang mengalami alih tugas dan bahkan demosi sekalipun”.

7. Restrukturisasi Dalam Organisasi

Adapun Restrukturisasi menurut Richard Blackburn (1982) dalam Ermaya Suradinata (2015:50), yakni “Cakupan Restrukturisasi yang merupakan elemen dasar organisasi adalah kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi”. Restrukturisasi dapat dilakukan jika sepanjang hasil evaluasi hasil kinerja struktur organisasi yang ada dirasa tidak efektif dan efisien. Restrukturisasi pada dasarnya harus sesuai dengan kebutuhan yang ada, kebutuhan terhadap apa yang ingin dilayani (masyarakat). Budaya kerja serta kebiasaan individu bisa menjadi salah satu faktor ketidakefektifan hasil evaluasi kinerja dibandingkan dengan apa yang ingin dicapai/tujuan organisasi.

8. Perangkat Daerah Menurut Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Pembentukan organisasi perangkat daerah yang berupa Dinas atau Badan diklasifikasikan berdasarkan Tipe A (beban kerja yang besar), Tipe B (beban kerja yang sedang) dan Tipe C (beban kerja yang kecil). Penentuan beban kerja bagi Dinas atau Badan didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kemampuan keuangan daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib serta potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan. Sedangkan besaran beban kerja pada Badan berdasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan daerah dan cakupan tugas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Mukomuko dalam Angka tahun 2016, secara astronomis Kabupaten Mukomuko terletak antara 02o 16' 32" – 03o 07' 46" Lintang Selatan dan 101o 01' 15" – 101o 1' 29,6" Bujur Timur. Sedangkan berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Mukomuko memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat; Selatan – Kabupaten Bengkulu Utara; Barat – Samudera Hindia; Timur – Kabupaten

Kerinci dan Kabupaten Merangin, Jambi. Kabupaten Mukomuko terdiri dari 15 kecamatan, 148 desa dan 3 kelurahan. Kabupaten Mukomuko berdiri dengan dasar Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003. Pembentukan Kabupaten Mukomuko dimekarkan dari kabupaten induknya, yakni Kabupaten Bengkulu Utara. Hal tersebut dilandasi berbagai pertimbangan strategis yang bermuara pada pengembangan wilayah dan optimalisasi pembangunan daerah.

1. Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko

Pemerintah Kabupaten Mukomuko terlebih dahulu membuat struktur organisasi perangkat daerah berdasarkan PP 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah. Lalu direalisasikan secara nyata berupa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko dengan memiliki beberapa jabatan struktural di dalamnya. Namun jabatan yang tersedia tersebut tentunya tidak semuanya terisi karena berbagai alasan. Sebanyak 8 (delapan) jabatan eselon II yang tidak terisi sebagian besar dikarenakan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tersebut telah memasuki masa pensiun. Adapun jabatan eselon IV yang tidak terisi yakni sebanyak 99 eselon IV/a dan 27 eselon IV/b. Jika diukur secara persentasenya terdapat 23,9% kekosongan jabatan pada eselon IV/a dan 36,4 % pada eselon IV/b.

Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Mukomuko merestrukturisasi organisasi perangkat daerahnya sedemikian rupa dan mendefinitivekannya dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko. Oleh karena hal tersebut maka struktur organisasi perangkat daerah yang berdasarkan pada PP 41 tahun 2007 tentang Perangkat Daerah tidak diakui lagi keabsahannya. Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada eselon IIB kali ini berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya Pemerintah Kabupaten Mukomuko melakukan Lelang Jabatan bagi jabatan tinggi pratama untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil-

nya yang telah memenuhi kualifikasi. Dari sekian banyak jabatan yang dilelang, ada 2 (dua) jabatan eselon IIb yang gagal lelang dikarenakan kurangnya pelamar pada jabatan tersebut.

Jika diidentifikasi lebih jauh, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 berhasil meringkas struktur organisasi perangkat daerah di Kabupaten Mukomuko. Sebesar 2,8% struktur organisasi yang berada pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko mengalami perampingan dengan mengedepankan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang ada. Ketika suatu organisasi mengalami perampingan, maka akan ada 2 (hal) kemungkinan besar yang terjadi, Pertama, anggaran tunjangan untuk jabatan struktural akan sangat berkurang sehingga bisa dialokasikan pada kegiatan yang lain. Yang kedua, akan ada Pegawai Negeri Sipil yang kehilangan jabatan eselonnya karena jabatan eselon yang tersedia penuh terisi dengan yang lain.

Namun agaknya PP 18 Tahun 2016 ini berhasil mengurangi tingkat kekosongan jabatan struktural pada eselon IV/a yang semula kosong 99 jabatan menjadi hanya 71 jabatan. Walaupun sebenarnya tidak terisinya jabatan struktural tersebut bukanlah suatu prestasi, namun penurunan sebanyak 25 jabatan kosong dari sebelumnya adalah suatu progress yang baik betapa Pemerintah Kabupaten Mukomuko ingin memperbaiki struktur organisasinya menjadi lebih efektif dan efisien.

2. Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mukomuko

Pegawai Negeri Sipil yang berada pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko secara menyeluruh berjumlah 3.880 orang. Terdiri atas 1.828 Pegawai Negeri Sipil berjenis kelamin laki-laki dan 2.052 Pegawai Negeri Sipil berjenis kelamin perempuan. Jika dibuat persentase, Pemerintah Kabupaten Mukomuko didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil yang berjenis kelamin Perempuan yakni sebesar 53% dari keseluruhan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang tersedia. Jika diidentifikasi, Golongan IVa sangat mendominasi pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko memiliki jabatan fungsional guru.

Sebagaimana kita ketahui bahwa guru bisa naik pangkat secara reguler setiap 2 (dua) tahun sekali jika angka kreditnya tercukupi. Golongan/ruang terbanyak kedua adalah IIIb, dimana memiliki persentase sebesar 16,80% mendominasi pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Hal tersebut merupakan dampak dari beberapa tahun silam, dimana jumlah formasi bagi sarjana sangat diprioritaskan pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Setelah 4 (empat) tahun terlewat, para sarjana yang memiliki Golongan/ruang IIIa bisa naik pangkat menjadi IIIb.

Jumlah sebaran Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Mukomuko mayoritas berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yakni sebesar 48,11% dari jumlah Pegawai Negeri Sipil secara keseluruhan. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil yang berada di Pemerintah Kabupaten Mukomuko memiliki jabatan fungsional sebagai guru. Lalu disusul oleh Dinas Kesehatan yang mendominasi sebesar 15,12% serta Rumah Sakit Umum Daerah sebesar 3,8% sebagai fungsional tenaga medis, Sekretariat Daerah sebesar 3,2% dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar 2,5% dari seluruh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang berjumlah 3.880 orang. Agaknya Pemerintah Kabupaten Mukomuko sengaja menempatkan begitu banyak Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja tersebut karena mengutamakan terpenuhinya pelayanan pada bidang pendidikan (guru), bidang kesehatan (tenaga medis), bidang administrasi serta bidang pekerjaan umum seperti pembangunan dan pemeliharaan berbagai sarana prasarana pemerintah guna menunjang aktivitas masyarakat pada umumnya. Adapun penempatan pejabat terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang baru meliputi sekian banyak Pegawai Negeri Sipil dengan latar belakang pendidikan yang beraneka ragam. Ada yang menempati jabatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi, namun tak jarang juga yang terlihat rancu antara jabatan dan gelar pejabat yang mengembannya.

Gelar yang paling banyak dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko adalah Sarjana Ekonomi. Sebesar 12,6% sarjana tersebut mendominasi segala jabatan struktural

terutama di bidang pengelolaan keuangan. Seluruh organisasi perangkat daerah membutuhkan Sarjana Ekonomi untuk ditempatkan pada Subbag Keuangan. Walaupun pada kenyataannya, masih ada Sarjana Ekonomi yang menduduki jabatan strategis seperti Camat. Seorang Camat harus mampu mengelola keuangan, melihat peluang serta meminimalisir pengorbanan untuk mencapai hasil yang maksimal. Prinsip Ekonomi memang harus diterapkan dimana saja dan kapan saja. Namun khusus untuk sektor pemerintahan, seharusnya lebih baik jika para Sarjana Ekonomi ini difokuskan pada jabatan strategis pengelolaan keuangan daerah saja. Gelar terbanyak kedua yakni sebesar 9,7% jabatan struktural pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko adalah Sarjana Hukum. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabupaten Mukomuko baru saja dimekarkan sejak 14 tahun yang lalu dari Kabupaten Bengkulu Utara. Sarjana Hukum dibutuhkan guna membangun regulasi yang kuat pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Berbagai jabatan strategis ditempati oleh Sarjana Hukum, fungsinya hanya 1 (satu) yakni agar mengurangi deviasi yang berkaitan dengan regulasi. Lalu disusul oleh Sarjana Teknik yang mendominasi sebanyak 6,8% jabatan struktural pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko dan sebanyak 5,1% didominasi oleh Sarjana Pertanian yang tersebar pada organisasi perangkat daerah yang tersedia.

Dari data yang ada, setidaknya ada 40 dari 646 jabatan struktural yang berada di Pemerintah Kabupaten Mukomuko diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki gelar Ahli Madya Pendidikan, Sarjana Pendidikan hingga Magister Pendidikan. Sebenarnya akan menjadi satu kesatuan yang harmonis jika apa yang dipelajari di bangku sekolah bisa diaplikasikan secara langsung pada jabatan yang diemban. Ada keseimbangan antara teori dan praktek, sehingga korelasinya tercipta nyata. Bagaimana bisa apa yang tidak dipelajari secara teori, namun dipraktikkan secara langsung pada pelayanan terhadap masyarakat? Pasti hasilnya tidak akan seoptimal jika pemahaman yang dimiliki mencakup teori dan praktek.

3. Dinamika Penempatan Pegawai dalam Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah

Menurut dokumentasi data yang peneliti observasi, jika menyesuaikan PP 41 Tahun 2007 di setiap struktur organisasi perangkat daerah akan terdapat Kepala Bidang Keuangan yang menduduki Eselon IIIb. Lalu yang terjadi saat menyesuaikan PP 18 Tahun 2016 ini, Kepala Bidang Keuangan tak lagi ada namun berubah menjadi Kepala Sub Bagian Keuangan yang notabene-nya hanya Eselon IVa pada struktur organisasi masing-masing OPD. Akhirnya yang terjadi yakni seluruh Kepala Bidang Keuangan mayoritas diberi jabatan fungsional umum/pelaksana karena ketidakterdisebabkannya jabatan pada eselon yang sama. Betapa banyak Kepala Bidang Keuangan yang kontra akan kebijakan ini, protes karena merasa tidak fair.

Observasi peneliti secara langsung dapat melihat bagaimana dinamika penempatan pegawai sangat beragam bentuknya. Ketidakpuasan terhadap keputusan yang ada, namun selama memiliki “backing-an” maka semua itu bisa dianulir atau diperbaiki sesuai dengan keinginan. Begitu nikmatnya bekerja, mudah sekali berpindah tempat tanpa berpikir masih banyak Pegawai Negeri Sipil di sekitarnya yang sebenarnya lebih layak untuk diperhitungkan. Hanya saja karena “berdiri sendiri” membuatnya tidak sanggup bertahan, lalu akhirnya tersingkir dan semakin jauh terbangun tidak diperhitungkan. Ini merupakan realita yang terjadi, sulit untuk mempertahankan idealisme sebagai Pegawai Negeri Sipil yang jujur dan amanah.

4. Hambatan Penempatan Pegawai dalam Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah

Hambatan pertama yang paling dirasakan seperti yang diungkapkan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah saat diwawancara oleh peneliti beberapa saat yang lalu yakni masih sangat terbatasnya pemahaman para Kepala OPD terhadap penghitungan beban kerja guna pemberian tipe akan OPD-nya. Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disebutkan pula bahwa masih

banyak pejabat berwenang yang tidak mengerti ketika seorang Pegawai Negeri Sipil diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi jabatan fungsional tertentu, maka yang bersangkutan tidak bisa pindah pada jabatan fungsional lain yang tidak sesuai dengan formasi awal saat ia diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Hambatan yang lain juga disebutkan yakni berkenaan kekosongan jabatan. Jumlah keseluruhan jabatan struktural yang tersedia yakni sebanyak 646 jabatan, namun masih banyak sekali yang kosong terutama pada eselon IVa dan IVb. Alasan faktor jarak tempuh dari tempat tinggal ke kantor (komplek pemda) membuat yang bersangkutan menolak untuk menerima jabatan struktural tersebut. Selain itu, mayoritas Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Mukomuko ini adalah perempuan sehingga cenderung lebih ingin menjadi staf atau pelaksana agar beban pekerjaan tidak terlalu berat. Berdasarkan observasi peneliti hambatan lainnya yakni ketersediaan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki golongan/ruang yang sesuai untuk menduduki jabatan struktural masih sangat terbatas. Sehingga jabatan yang tersediapun terpaksa menjadi kosong. Selain itu, kekuatan politis memang sangat mendominasi dalam penempatan pegawai. Para penguasa khawatir jika dikelilingi oleh orang yang tidak satu visi dengannya.

5. Upaya Guna Meminimalisir Hambatan Penempatan Pegawai dalam Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah

Dalam wawancara peneliti bersama Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Beliau menyebutkan bahwa kepada Pegawai Negeri Sipil yang masih kurang dalam pemahaman perubahan regulasi ataupun restrukturisasi organisasi yang baru, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah akan memberikan sosialisasi berbentuk pemahaman secara intensive tentang peraturan perundang-undangan yang update dengan pendekatan yang persuasif.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyatakan pula dalam wawancaranya bahwa untuk mengantisipasi adanya tekanan dari kepentingan politis, titipan si A, B dan C Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam

hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memberikan ruang khusus hanya 30% dari jumlah jabatan struktural yang tersedia. Bagi mereka yang memiliki kompetensi sesuai kualifikasi yang diharapkan masih bisa bersaing secara sehat di dalam 70% lainnya yang tidak terintimidasi oleh politisasi organisasi tersebut. Hal lain disebutkan pula bahwa pada 3-6 bulan kedepan akan dilihat progress dari 30% Pegawai Negeri Sipil titipan tersebut. Jikalau tidak mencapai target kinerja yang diharapkan oleh Bupati, maka yang bersangkutan bisa saja dimutasi kembali. Jadi bisa dikatakan masa transisi PP 41 Tahun 2007 ke PP 18 Tahun 2016 ini masih dalam tahap percobaan selama 6 (enam) bulan.

Kepala Bidang Mutasi, Pengembangan Karir dan Informasi Kepegawaian menyebutkan dalam wawancaranya yakni memang masih banyak sekali jabatan yang kosong, tetapi pelayanan tidak boleh terhambat karenanya. Solusinya adalah ada beberapa Pegawai Negeri Sipil yang double job atau Plt (Pelaksana Tugas) di jabatan lain selain jabatan yang diembannya. Juga upaya lain disebutkan bahwa untuk meminimalisir kekurangan tenaga medis seperti dokter spesialis, ada berbagai bentuk beasiswa yang ditawarkan salah satunya adalah tugas belajar dari Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Tugas belajar ini bukan hanya untuk dokter spesialis saja, bagi yang ingin semakin ahli dibidangnya siapapun diberi kesempatan yang sama. Harapannya bisa melengkapi kualifikasi dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang masih dirasa kurang.

PENUTUP

Dinamika penempatan pegawai dalam restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Kabupaten Mukomuko menunjukkan bahwa secara umum perubahan nomenklatur organisasi telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Restrukturisasi ini berdampak pada perubahan tipe dan struktur organisasi yang menyebabkan terjadinya perampingan jumlah jabatan struktural. Dalam proses penempatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah berupaya menyesuaikan kualifikasi pegawai dengan jabatan yang tersedia, mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja.

Namun, penempatan pegawai tidak lepas dari berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman kepala OPD dalam melakukan analisis beban kerja, yang menyulitkan proses penetapan tipe organisasi. Selain itu, penghapusan posisi Kabid Keuangan menyebabkan kekosongan jabatan struktural eselon III, yang berdampak pada non-job beberapa pejabat. Kekurangan jumlah pegawai dengan golongan memadai, minimnya minat pegawai terhadap pengembangan karir, dan kendala geografis serta sosial—seperti dominasi pegawai perempuan yang enggan menduduki jabatan struktural karena beban kerja—semakin memperumit kondisi. Tak kalah penting, intervensi politik dalam penempatan pegawai menyebabkan ketidaksesuaian antara jabatan dan latar belakang pendidikan yang dimiliki.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah daerah melalui Bagian Organisasi melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi pejabat terkait beban kerja dan analisis jabatan. BKPSDM juga menerapkan solusi sementara seperti penunjukan pelaksana tugas (Plt) dan sistem double job bagi pegawai yang dianggap mampu. Di samping itu, upaya peningkatan kapasitas pegawai dilakukan dengan mendorong partisipasi dalam program beasiswa atau tugas belajar. Terhadap politisasi organisasi, BKPSDM mengakomodasi kompromi dengan memberikan ruang terbatas sebesar 30% bagi pengaruh politik, sementara 70% posisi tetap diprioritaskan bagi pegawai yang berkompetisi secara profesional.

Saran dari peneliti menekankan perlunya revolusi mental di kalangan pegawai agar mereka siap ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan organisasi. Pemerintah Kabupaten Mukomuko juga disarankan mengajukan penambahan formasi CPNS ke Kementerian PAN-RB untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang semakin kompleks. Untuk pegawai yang berdomisili jauh, disarankan penyediaan rumah dinas yang dekat dengan tempat kerja. Soal kesetaraan gender dalam jabatan struktural, disampaikan bahwa jam kerja yang sama antara laki-laki dan perempuan seharusnya tidak menjadi penghalang untuk perempuan berkarir. Peneliti juga menyoroti bahwa praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam penempatan

pegawai adalah warisan lama yang hanya bisa diperangi melalui pendekatan spiritual dan keyakinan akan keadilan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko. 2015. *Kabupaten Mukomuko Dalam Angka 2015*. Mukomuko: CV Marko Jaya.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko. 2016. *Kabupaten Mukomuko Dalam Angka 2016*. Mukomuko: CV Marko Jaya.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hasibuan, Malayu. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Labolo, Muhadam. 2015. *Dialektika Ilmu Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- _____. 2015. *Dinamika Politik & Pemerintahan Lokal*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mangkunegara, Anwar. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Robbins, Stephen. 2015. *Teori Organisasi Struktur Desain dan Aplikasi*. Jakarta: Arcan.
- Rustanto, Bambang. 2015. *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sedarmayanti. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Setiyono, Budi. 2016. *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi*. Bandung: Nuansa.
- Siagian, Sondang. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suradinata, Ermaya. 2015. *Leadership: How to Build a Nation*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Tamin, Feisal. 2004. *Reformasi Birokrasi Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara*. Bandung: Mizan Media Utama.

PENGARUH BUDAYA KERJA APARATUR DAN KOMUNIKASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PELAPORAN MASYARAKAT BERBASIS APLIKASI *QLUE* DI KELURAHAN TANJUNG DUREN UTARA KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Abdul Rosid¹; Ahmad Syauqi²

¹Magister Administrasi Pemerintahan Daerah Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta; ²Universitas Pamulang, Tangerang Selatan
email : ¹abdulrosid@gmail.com, ²abmadsyauqi.gem@gmail.com

Paper Accepted: 20 Juni 2025
Paper Reviewed: 24-30 Juni 2025
Paper Edited: 01-08 Juli 2025
Paper Approved: 23 Juli 2025

ABSTRAK

Fenomena yang dijadikan objek penelitian adalah kualitas pelayanan pelaporan masyarakat berbasis aplikasi *Qlue* di Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat. Tujuan penelitian adalah (1) Mengetahui dan menganalisis pengaruh Budaya Kerja Aparatur terhadap Kualitas Pelayanan Pelaporan Masyarakat Berbasis Aplikasi *Qlue* di Kelurahan Tanjung Duren Utara; (2) Mengetahui dan menganalisis pengaruh Komunikasi terhadap Kualitas Pelayanan Pelaporan Masyarakat Berbasis Aplikasi *Qlue* di Kelurahan Tanjung Duren Utara; (3) Mengetahui dan menganalisis pengaruh Budaya kerja Aparatur dan Komunikasi secara bersama-sama terhadap Kualitas Pelayanan Pelaporan Masyarakat Berbasis Aplikasi *Qlue* di Kelurahan Tanjung Duren Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deksriptif yang bertujuan untuk menganalisis besarnya pengaruh kedua variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara parsial maupun simultan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi Kepustakaan dan survei. Penentuan sampel digunakan sampel jenuh (sensus) sebanyak 150 responden. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, yaitu: (1) Terdapat pengaruh Budaya Kerja Aparatur terhadap Kualitas Pelayanan Pelaporan Masyarakat Berbasis Aplikasi *Qlue* di Kelurahan Tanjung Duren Utara sebesar 53,9%; (2) Terdapat pengaruh Komunikasi terhadap Kualitas Pelayanan Pelaporan Masyarakat Berbasis Aplikasi *Qlue* di Kelurahan Tanjung Duren Utara sebesar 54,5%; (3) Terdapat pengaruh Budaya Kerja Aparatur dan Komunikasi terhadap Kualitas Pelayanan Pelaporan Masyarakat Berbasis Aplikasi *Qlue* di Kelurahan Tanjung Duren Utara sebesar 57,1%.

Kata Kunci : Budaya Kerja, Komunikasi, Kualitas Pelayanan, Pelaporan Masyarakat

PENDAHULUAN

Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan Negara adalah turut serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia, hal ini sejalan dengan salah satu Nawacita kedua yang disuguhkan oleh Presiden Joko Widodo yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bebas, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan

membersihkan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada intitusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

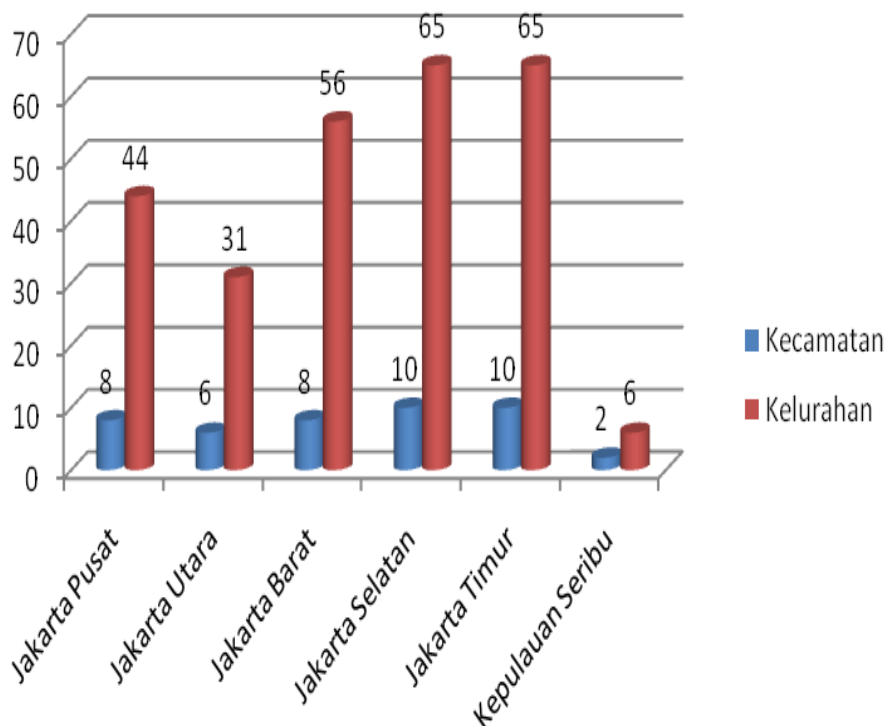
Kedua elemen tersebut jelas memperlihatkan sebuah peran Negara dalam melindungi keutuhan manusianya sebagai warga Negara, sehingga Pemerintah menganggap perlu untuk meningkatkan kepercayaan public dengan sistem yang bebas dan efektif. Dalam hal tersebut Pemerintah DKI Jakarta merespon positif dengan menerbitkan sistim aplikasi berbasis internet yaitu Qlue yang langsung dapat memfasilitasi keluhan warganya dalam segala hal yang menyangkut kesejahteraan dan ketertiban di Provinsi DKI Jakarta.

Memperhatikan keseluruhan luas wilayah 7.659,02 km², meliputi 662,33 km²

daratan, dan 6.977,5 km² lautan, Provinsi DKI Jakarta terbagi dalam lima Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi. Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki luas 48,13 km²; Kota Administrasi Jakarta Utara dengan luas 146,66 km²; Kota Administrasi Jakarta Barat dengan luas 129,54 km²; Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan luas 141,27 km²; dan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan luas 188,03 km², serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas 8,70 km². Secara administrasi kewilayahan, masing-masing Kota dan Kabupaten Administratif dibagi menjadi beberapa kecamatan. Masing-masing kecamatan tersebut dibagi menjadi beberapa kelurahan. Adapun penyebaran Kecamatan dan Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

Gambar 1

Sebaran Kecamatan dan Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta



Atas dasar kondisi kewilayahan yang demikian itu dan dengan jumlah penduduk yang mencapai 10.187.595 juta jiwa pada tahun 2011, Provinsi DKI Jakarta tampak menjadi daerah yang sangat dinamis. Sementara itu pesatnya pertumbuhan penduduk di Provinsi DKI Jakarta terkait erat dengan kedudukan Jakarta sebagai pusat

pemerintahan dan perekonomian yang memiliki daya tarik bagi penduduk di luar Jakarta untuk tinggal dan atau mencari penghidupan. Penduduk yang datang pun beragam, baik dari sisi budaya, etnis maupun tingkat pendidikannya. Keragaman ini menjadikan Jakarta sebagai kota yang kaya budaya dan menjadi kawasan pertemuan

budaya yang dinamis. Apabila tidak dikelola dengan baik, keragaman ini tentu dapat menimbulkan berbagai masalah perkotaan seperti misalnya munculnya para pedagang kaki lima yang mengganggu ketertiban umum, buang sampah sembarangan, aktivitas parkir liar, jalan yang rusak dan drainase yang tidak lancar.

Terhadap masalah perkotaan yang demikian itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentu memerlukan berbagai pendekatan untuk tidak hanya meningkatkan kinerja aparatur namun sekaligus juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tindak Lanjut Evaluasi Respon Opini Publik. Dalam instruksi ini dinyatakan bahwa dalam rangka upaya mewujudkan visi "Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapih, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik", pengaduan masyarakat yang masuk di Respon Opini Publik Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari berita online, LAPOR 1708, Facebook, Email, Kliping Media, SMS Center, Balai Warga, Twiter, Unjuk Rasa, Call Center 164, perlu ditindak lanjuti. Untuk itu, Gubernur mengintruksikan kepada para Walikota, Bupati Kepulauan Seribu, para Camat dan Lurah Provinsi DKI Jakarta untuk :

- (1) Menyelesaikan permasalahan drainase, jalan rusak, parkir liar dan kaki lima yang ada di wilayahnya dengan berkoordinasi dengan SKPD/UPKD terkait;
- (2) Melaporkan kondisi wilayahnya secara rutin dan membuat program usulan yang dapat menyelesaikan masalah tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Gubernur ini;
- (3) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap bulan pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Terkait dengan Instruksi Gubernur di atas, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 223 Tahun 2015 Tentang Penggunaan Aplikasi Jakarta Smart City di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam instruksi ini dinyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan

pelayanan dan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta sebagai upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan berbasis teknologi informasi, dengan ini menginstruksikan kepada para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta; para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta; para Walikota Provinsi DKI Jakarta; Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta; para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta; para Camat Provinsi DKI Jakarta; para Lurah Provinsi DKI Jakarta untuk :

- Satu, mengunduh Aplikasi Mobile JSC (Jakarta Smart City Apps) dan Jakarta Smart City Portal pada telepon genggam pintar serta pedoman pemanfaatannya;
- kedua, mengoperasionalkan dan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada pada Jakarta Smart City Apps dan Jakarta Smart City Portal sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu serta menambah informasi dan potensi mengenai Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai kewenangannya;
- ketiga, menugaskan para staf di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UPKD) masing-masing untuk mengunduh dan memanfaatkan Jakarta Smart City Apps dan Jakarta Smart City Portal, guna peningkatan monitoring dan tindak lanjut pelaporan/pelayanan publik.

Konsekuensi dari terbitnya dua intruksi Gubernur tersebut adalah bahwa semua SKPD/UPKD Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan pelayanan pelaporan masyarakat berbasis aplikasi Qlue. Terdapat dua hal penting yang tercakup dalam pelayanan pelaporan masyarakat berbasis aplikasi Qlue ini. *Pertama*, bagaimana SKPD/UPKD mengelola informasi yang masuk dari masyarakat melalui Aplikasi Jakarta Smart City Apps dan Jakarta Smart City Portal pada telepon genggam pintar sebagai suatu konsep pelayanan informasi publik. *Kedua*, bagaimana SKPD/UPKD menindaki lanjut informasi yang masuk dari masyarakat melalui aplikasi teknologi informasi tersebut. Dengan demikian terwujud peningkatan pelayanan dan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tercipta pula tata kelola pemerintahan yang transparan berbasis teknologi informasi.

Merujuk kepada kebijakan pelayanan yang demikian itu, setiap SKPD/UPKD,

termasuk Kelurahan Tanjung Duren Utara, wajib melaksanakan pelayanan dan keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan berbasis teknologi informasi. Pelayanan ini terkait dengan penyelesaian permasalahan darinase, jalan rusak, pakir liar dan kaki lima yang ada di wilayahnya masing-masing.

Maka dalam konteks itu, dari pengamatan langsung diperoleh catatan bahwa pelayanan pelaporan masyarakat berbasis aplikasi Qlue yang diselenggarakan oleh Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, belum optimal dalam merespon dinamika laporan masyarakat yang masuk melalui aplikasi Qlue. Atau dengan anggapan lain, kualitas pelayanan pelaporan masyarakat berbasis aplikasi Qlue masih belum optimal untuk memenuhi harapan masyarakat, terutama yang terkait dengan laporan yang harus ditindaklanjuti.

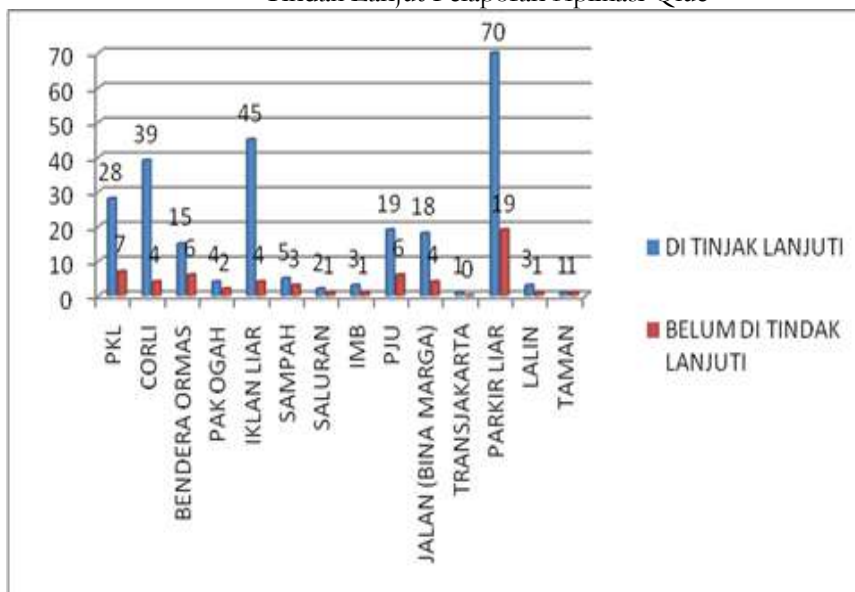
Sekurang-kurangnya tercatat tiga hal yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pelaporan masyarakat berbasis aplikasi Qlue di Kelurahan Tanjung Duren Utara belum

optimal dalam memenuhi harapan masyarakat setempat. *Pertama*, jumlah aparatur dan fasilitas pelayanan yang terfokus untuk melayani laporan masyarakat masih terbatas. Hal ini terindikasi dari lemahnya perhatian aparatur terhadap setiap laporan masyarakat. *Kedua*, lemahnya respon aparatur terhadap setiap laporan masyarakat. *Ketiga*, keandalan aparatur dalam menyikapi dan menindaklanjuti laporan masyarakat masih terkendala oleh lemahnya koordinasi dengan instansi terkait, terutama yang terkait dengan masalah sarana dan prasarana lingkungan.

Kuantitas petugas dilapangan dan penerima laporan masyarakat yang terkait dengan aplikasi Qlue tersebut sangatlah minim mengingat pelayanan yang dilaksanakan bukan hanya terkait dengan permasalahan yang timbul akibat dari pelaporan aplikasi Qlue. Jumlah petugas yang tersedia di Kelurahan Grogol Petamburan adalah sebanyak 11 petugas diluar Kepala Kelurahan dan Sekretaris Kelurahan.

Berdasarkan data sepanjang tahun 2015 bahwa terdapat pelaporan berbasis aplikasi *Qlue*, yang belum di tindak lanjuti yaitu sebagai berikut :

Gambar 2
Tindak Lanjut Pelaporan Aplikasi Qlue



Sumber: Laporan Pengaduan Qlue Kel. Tanjung Duren Utara, 2016

Berdasarkan data yang tersaji terlihat dari total 312 pelaporan pengaduan hanya sebanyak 253 pelaporan pengaduan yang mendapat tindak lanjut dari petugas atau

sekitar 81.1%, hal ini memperlihatkan bahwa sebesar 18.9% kurang mendapat respon dari petugas di Kelurahan Tanjung Duren Utara

dalam merespon pelaporan pengaduan masyarakat berbasis aplikasi *Qlue*.

Belum optimalnya kualitas pelayanan pelaporan masyarakat berbasis aplikasi *Qlue* di Kelurahan Tanjung Duren Utara tampak menjadi suatu fenomena kinerja pelayanan publik yang tidak berdiri sendiri. Mengapa demikian, karena terdapat sejumlah variabel yang berkorelasi atau mempengaruhi fenomena tersebut.

Mengacu pada fenomena tersebut, penulis berasumsi bahwa budaya kerja aparatur dan sistem komunikasi layak dianggap sebagai dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan pelaporan masyarakat berbasis aplikasi *Qlue* di Kelurahan Tanjung Duren Utara. Untuk mengaktualisasikan asumsi ini, penulis termotivasi untuk melakukan suatu pendekatan penelitian. Untuk itu, penulis memilih judul penelitian berikut :

”Pengaruh Budaya Kerja Aparatur dan Komunikasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pelaporan Masyarakat Berbasis Aplikasi *Qlue* di Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat”

Judul penelitian tersebut di atas dipilih dengan alasan bahwa fenomena pelayanan pelaporan masyarakat berbasis aplikasi *Qlue* dan korelasinya dengan budaya kerja aparatur dan sistem komunikasi merupakan obyek bagi penerapan Ilmu Administrasi Pemerintahan Daerah. Argumennya adalah bahwa pelayanan pelaporan masyarakat berbasis aplikasi *Qlue* serta budaya kerja aparatur dan sistem komunikasi merupakan elemen-elemen administrasi pemerintahan daerah.

METODE PENELITIAN

Unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh unit kerja Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan yang berada dalam wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Populasi penelitian sebanyak 150 orang yang terdiri atas petugas pelayanan Pelaporan Masyarakat Berbasis Aplikasi *Qlue* sebanyak 53 pegawai dan Petugas RT dan RW di Kelurahan Tanjung Duren Utara yang memiliki Aplikasi *Qlue* sebanyak 97 dalam kurun waktu satu bulan pelayanan.

Dengan keterjangkauan jumlah populasi maka jumlah sampel penelitian yang dijadikan responden penelitian pada penelitian

ini adalah seluruh jumlah populasi. Maka atas dasar tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel jenuh (sensus) seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2009:85) “bahwa Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel”. Jadi sesuai dengan ketentuan tersebut bahwa sampel yang dijadikan responden penelitian pada penelitian ini berjumlah 150 responden.

Teknik pengumpulan data sekunder dari berbagai buku dan dokumen serta data primer dari para responden yang menjadi sampel penelitian yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan, observasi, kuesioner penelitian. Adapun teknik analisis data menurut sudjana (1996: 4), data yang berbentuk bilangan disebut *data kuantitatif*, harganya berubah-ubah atau bersifat variabel. Dari nilainya dikenal dua golongan data kuantitatif ialah : Data dengan variabel diskrit atau singkatnya data diskrit dan data dengan variabel kontinu disingkatnya data kontinum. Adapun rumus statistik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini yaitu dengan menggunakan persamaan regresi, koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji t dan uji F.

Kerangka Pemikiran

Pelayanan masyarakat yang efektif jelas sangat membutuhkan dukungan budaya kerja aparatur kelurahan, agar kinerja pelayanan masyarakat tersebut menjadi berkualitas dan maksimal dalam menjangkau seluruh sasaran pelayanan. Untuk itu dibutuhkan dukungan budaya kerja aparatur kelurahan. Triguno (1999:9) yaitu melaksanakan Budaya Kerja mempunyai arti yang sangat dalam, karena akan merubah sikap dan perilaku SDM untuk mencapai produktivitas kerja yang lebih tinggi dalam menghadapi tantangan masa depan. Manfaat yang didapat antara lain sebagai berikut : menjamin hasil kerja dengan kualitas yang lebih baik, membuka seluruh jaringan komunikasi, keterbukaan, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, menemukan kesalahan dan cepat memperbaiki; cepat menyesuaikan diri terhadap perkembangan dari luar (faktor eksternal seperti pelanggan, teknologi, sosial, ekonomi dan lain-lain); mengurangi laporan berupa data-data dan informasi yang salah dan palsu. Disamping itu masih banyak lagi manfaat yang muncul seperti kepuasan kerja

meningkat, pergaulan yang lebih akrab, disiplin meningkat, pengawasan fungsional berkurang, pemborosan berkurang, tingkat absensi turun, ingin belajar terus, ingin memberikan yang terbaik bagi organisasi dan lain-lain.

Berdasarkan deskripsi rujukan teori yang tersaji di atas, dapat dirangkai definisi konseptual variabel penelitian bahwa *Budaya Kerja adalah budaya kerja aparatur Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat yang terungkap dari pandangan, sikap dan perilaku kerja aparatur dalam pelaksanaan program pelayanan pelaporan masyarakat berbasis aplikasi Qlue*. Definisi konseptual ini dideskripsikan menjadi tiga dimensi kajian : Dimensi pandangan kerja aparatur, Dimensi sikap kerja aparatur, dan Dimensi perilaku kerja aparatur.

Dimensi Pandangan Kerja Aparatur dideskripsikan lagi menjadi indikator-indikator : (1) Persepsi kerja, (2) Harapan kerja, (3) Semangat kerja, dan (4) Motivasi kerja. *Dimensi Sikap Kerja Aparatur* dideskripsikan lagi menjadi indikator-indikator : (5) Sikap dalam menerima pekerjaan, (6) Sikap dalam melaksanakan pekerjaan, (7) Sikap dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, dan (8) Sikap dalam melayani masyarakat, *Dimensi Perilaku Kerja* dideskripsikan menjadi indikator-indikator : (9) Produktivitas kerja, (10) Efektivitas kerja, (11) Efisiensi kerja, dan (12) Akuntabilitas kerja.

Menurut Pace and Faules (2006:26). bila kita melihat apa yang terjadi ketika seseorang terlibat dalam komunikasi, kita menemukan bahwa terdapat dua bentuk umum tindakan yang terjadi : (1) *penciptaan pesan* atau, lebih tepatnya, *penciptaan pertunjukan (display)*; dan (2) *penafsiran pesan* atau penafsiran pertunjukan.

Menunjukkan (*to display*) berarti bahwa anda membawa sesuatu untuk diperhatikan atau orang lain. Agar pertunjukan menjadi suatu bentuk perilaku komunikasi, ia harus merepresentasikan atau mewakili atau melambangkan sesuatu lainnya. Ketika anda menciptakan suatu pertunjukan pesan, anda terlibat dalam suatu aspek komunikasi mengundang perhatian atas sesuatu. (Pace and Faules, 2006:27).

Bentuk kedua perilaku yang terjadi ketika seseorang terlibat dalam komunikasi

adalah menafsirkan pertunjukan-pesan (Redding, 1972, dalam Pace and Faules, 2006:28) Menurut Random House Dictionary, menafsirkan (*to interpret*) berarti menguraikan atau memahami sesuatu dengan suatu cara tertentu. Komunikasi dapat dibedakan dengan semua perilaku manusia dan organisasi lainnya karena ia melibatkan proses mental memahami orang, objek, dan peristiwa, yang kita sebut pertunjukan-pesan. Satu-satunya pesan yang penting dalam berkomunikasi adalah pesan yang berasal dari proses penafsiran (Redding & Sanborn, 1964, dalam Pace and Faules, 2006:28) Kita mungkin secara sadar atau untuk melukiskan suatu makna yang kita miliki, namun satu-satunya makna yang mempunyai pengaruh terhadap orang-orang adalah makna yang diberikan orang-orang itu pada pertunjukan tersebut. Apa yang ada dalam pikiran kita tidaklah menjadi soal; bagaimana orang lain menafsirkan apa yang kita lakukan atau katakan adalah apa yang mempengaruhi perasaan dan tindakannya.

Selanjutnya, berdasarkan pendapat Hasan (2014,1.3) menjabarkan tentang Komunikasi Pemerintahan adalah proses dinamik, di mana pesan-pesan di kemas, dimunculkan dan ditafsirkan. Pradigma komunikasi pemerintahan ditinjau dari sudut pandang teoritis dan pragmatis dapat diamati dari tiga aspek penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup: 1) Aspek Struktural; 2) Aspek Prosedural; dan 3) Aspek Kultural.

Dalam konteks yang demikian itu, suatu pesan yang disampaikan mungkin akan menimbulkan efek komunikasi yang diharapkan. Namun sebaliknya, suatu pesan mungkin akan menimbulkan efek komunikasi yang tidak diharapkan. Karena itu diperlukan suatu konsep pemahaman yang mendalam terhadap pentingnya komunikasi dalam proses pelaksanaan pekerjaan yang tercakup dalam karir pegawai. Dalam konteks ini, Ruben and Steward (1998:3) mengatakan :

Careers in business, government, or education call on our abilities to analyze communication situations, develop effectively communication strategies, collaborate effectively with others, and receive and present ideas effectively through various communication channels. Studies of various occupations consistently identify the following communication competencies as

among the most critical to success : Personal Skills and attitudes, Interpersonal skills, Oral and Written

Dengan landasan teori komunikasi dari Hasan (2014, 1.3) definisi konseptual ini diperoleh 3 dimensi kajian : Dimensi aspek struktural; Dimensi aspek prosedural; dan Dimensi aspek kultural. Ketiga dimensi kajian tersebut dikembangkan menjadi 12 indikator.

Dengan pandangan ini diduga komunikasi berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pelaporan masyarakat berbasis aplikasi Qlue yang diselenggarakan oleh Kelurahan Tanjung Duren Utara.

Dalam konteks hubungan budaya kerja dan komunikasi dengan kualitas pelayanan, maka konsep pemahaman kualitas pelayanan merujuk pada pendapat Zeithaml et.al (1990:42) yang mengatakan bahwa *Servicequality* mengandung *Tangibles*; *Reliability*; *Responsiveness*; *Assurance*; dan *Empathy*. Dengan landasan teori *Servicequality* dari Zeithaml et.al, maka kualitas pelayanan pelaporan masyarakat berbasis aplikasi Qlue yang diselenggarakan oleh Kelurahan Tanjung Duren Utara dipandang sebagai suatu karakteristik pelayanan publik di bidang kemasyarakatan yang terungkap dari *tangible*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Budaya Kerja terhadap Kualitas Pelayanan Pelaporan Masyarakat Berbasis Aplikasi Qlue di Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan

Unsur dasar Budaya Kerja itu adalah mata rantai proses, dimana tiap kegiatan berkaitan dengan proses lainnya atau suatu hasil pekerjaan merupakan suatu masukan bagi proses pekerjaan lainnya. Dalam suatu organisasi bekerja melalui serangkaian proses yang saling berkaitan, yang terjadi melalui dan melewati batas-batas birokrasi. Kekuatan mata rantai proses secara terpadu tersebut tergantung pada rangkaian terlemah pada proses individual.

Dalam dimensi pandangan kerja, indikator-indikator yang mempengaruhi Kualitas Pelayanan Pelaporan Masyarakat Berbasis Aplikasi Qlue di Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan adalah persepsi kerja; harapan kerja; semangat

kerja; dan motivasi kerja, dalam dimensi sikap kerja, indikator-indikator yang mempengaruhi Kualitas Pelayanan Pelaporan Masyarakat Berbasis Aplikasi Qlue di Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan adalah sikap dalam menerima pekerjaan; sikap dalam melaksanakan pekerjaan; sikap dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan sikap dalam melayani masyarakat, dalam dimensi perilaku kerja, indikator-indikator yang mempengaruhi Kualitas Pelayanan Pelaporan Masyarakat Berbasis Aplikasi Qlue di Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan adalah produktivitas kerja; efektivitas kerja; efisiensi kerja; dan akuntabilitas kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan. Temuan penelitian ini, diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Triguno (1999:9) bahwa Budaya Kerja itu adalah mata rantai proses, dimana tiap kegiatan berkaitan dengan proses lainnya atau suatu hasil pekerjaan merupakan suatu masukan bagi proses pekerjaan lainnya. Dalam suatu organisasi bekerja melalui serangkaian proses yang saling berkaitan, yang terjadi melalui dan melewati batas-batas birokrasi. Kekuatan mata rantai proses secara terpadu tersebut tergantung pada rangkaian terlemah pada proses individual. Kesalahan dalam suatu proses akan mempengaruhi pada kualitas produk akhir, oleh karena itu jaminan mutu terletak kekuatan setiap rangkaian yang berjalan benar sejak saat pertama pada setiap tahap pekerjaan.

Peningkatan yang Kualitas Pelayanan Pelaporan Masyarakat Berbasis Aplikasi dapat dilakukan melalui peningkatan Budaya Kerja pada Kelurahan Tanjung Duren Utara, hal tersebut telah terbukti dari hasil pengujian hipotesis yang diajukan dengan hasil adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.034 > 1.960$), keterpengaruhannya tersebut terlihat kuat ($R = .734$) dan signifikan ($.044$) sehingga dengan kuatnya dan signifikannya keterpengaruhannya tersebut maka Kualitas Pelayanan Pelaporan Masyarakat Berbasis Aplikasi Qlue yang diselenggarakan oleh Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan maka dapat dilakukan dengan meningkatkan Budaya Kerja dengan lebih baik lagi.

Besarnya pengaruh Budaya Kerja terhadap Kualitas Pelayanan Pelaporan

Masyarakat Berbasis Aplikasi yang menunjukkan angka 53,9% merupakan sebuah angka yang besar, sehingga peningkatan Budaya Kerja pada Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan dapat dilakukan dengan melaksanakan peningkatan pada dimensi yang tercakup dalam variabel Budaya Kerja yaitu:

Dimensi Pandangan Kerja yang terdiri Persepsi kerja dari para aparatur untuk lebih melayani dan cepat tanggap atas pelaporan yang masuk sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal; Harapan kerja aparatur perlu adanya peningkatan hal ini dapat diwujudkan dengan pemberian *reward* kepada aparatur yang antusias melakukan tugasnya atas pelaporan dari masyarakat yang masuk; Semangat kerja petugas dapat distimulus dengan pemberian bonus sehingga para petugas dapat bekerja lebih tanggap; Motivasi kerja dari petugas pelayanan pelaporan masyarakat berbasis aplikasi Qlue dapat ditingkatkan dengan cara pemberian kebutuhan kerja yang dapat menunjang kegiatan dari petugas dalam melaksanakan tugas pelaporan masyarakat berbasis aplikasi Qlue.

Dimensi Sikap Kerja yang terdiri dari Sikap dalam menerima pekerjaan dapat ditingkatkan dengan memberikan arahan agar melayani dengan penuh rasa kesopanan dan kesantunan; Sikap dalam melaksanakan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan melakukan standar pelayanan yang baik sehingga dapat memberikan kesan kualitas pelayanan yang baik; Sikap dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dapat dilakukan dengan tutur kata yang baik serta sesuai dengan azas kesopanan; Sikap dalam melayani masyarakat dapat diaktualisasikan dengan bahas badan yang baik dalam menghadapi keluhan masyarakat serta melanjutkannya dengan penuntasan pelaksanaan Pelaporan Masyarakat.

Dimensi Perilaku Kerja yang terdiri Produktivitas kerja dapat ditingkatkan dengan melakukan pemberian *reward and punishment* sehingga petugas dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab; Efektivitas Kerja dapat dilihat dari hasil kerja yang dilakukan oleh para petugas dalam mengaktualisasikan Pelaporan Masyarakat Berbasis Aplikasi Qlue; Efisiensi kerja dapat dilihat dari penyelesaian Pelaporan Masyarakat

Berbasis Aplikasi Qlue; Akuntabilitas kerja petugas dalam menerima Pelaporan Masyarakat yang berbasis aplikasi Qlue dapat ditingkatkan dengan meningkatkan pengawasan sehingga hasil kerja petugas dapat terlihat menjadi lebih baik lagi.

Hasil penelitian pengaruh Budaya Kerja terhadap Kualitas Pelayanan ini sejalan dengan hasil penelitian dari Maria (2014) dengan salah satu hasilnya yaitu budaya kerja (Inovatif dan Pengambilan Resiko, Perhatian terhadap detail, Orientasi hasil, Orientasi orang, Orientasi tim, Keagresifan, dan Kemantapan) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pelayanan publik. Serta penelitian yang dilakukan oleh Frinaldi (2014) dengan salah satu hasilnya adalah secara umum budaya kerja PNS di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Payakumbuh sudah tinggi, meskipun terdapat 2 indikator yang masih sedang. Upaya peningkatan budaya kerja ada 2 indikator ini dapat dilakukan dengan program-program pelatihan yang berbasiskan kearifan lokal. Selain itu, diperlukan adanya keterlibatan pihak yang ahli di bidang pembinaan budaya kerja oleh pemerintah kota Payakumbuh dalam membangun dan membina budaya kerja positif berbasiskan kearifan lokal tersebut.

2. Pengaruh Komunikasi terhadap Kualitas Pelayanan Pelaporan Masyarakat Berbasis Aplikasi Qlue

Komunikasi adalah sebuah proses saling berbagi atau menggunakan informasi secara bersama dan bertalian antara peserta dalam proses informasi (Hasan, 2014:1.3). berdasarkan hasil penelitian bahwa komunikasi mempengaruhi Kualitas Pelayanan Pelaporan Masyarakat Berbasis Aplikasi Qlue di Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan, sehingga dengan meningkatnya Komunikasi yang terjalin di Kelurahan Tanjung Duren Utara dapat meningkatkan Kualitas Pelayanan Pelaporan Masyarakat Berbasis Aplikasi Qlue yang terselenggara di Kelurahan Tanjung Duren Utara.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pelaporan Masyarakat Berbasis Aplikasi Qlue tersebut dengan merujuk dari pendekatan teori dari Hasan (2014:1.3) yang mengemukakan terdapat tiga dimensi dalam komunikasi yaitu:

1. Aspek Struktural.
Untuk dapat bekerja secara efektif dalam organisasi, para manajer harus memiliki pemahaman yang jelas tentang struktur organisasi. Dengan memandang suatu bagan organisasi, seseorang hanya melihat suatu susunan posisi, tugas-tugas pekerjaan dan garis wewenang dari bagian-bagian dalam organisasi.
2. Aspek Prosedural
Keterkaitan prosedur komunikasi (*communication prosedur*) dengan kelangsungan hidup organisasi terletak pada kemampuan manajemen untuk menerima, menyampaikan, dan melaksanakan komunikasi.
3. Aspek Kultural
Kultur organisasi adalah cara melihat dan berpikir mengenai perilaku dari dan dalam organisasi, suatu perspektif untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Kultur organisasi mengandung bauran nilai-nilai kepercayaan, asumsi, persepsi, norma, kekhasan dan pola perilaku.

Dari pendapat tersebut terungkap adanya hubungan di antara komunikasi dengan Kualitas Pelayanan Pelaporan Masyarakat Berbasis Aplikasi Qlue di Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan. Hal ini jelas bahwa para petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yaitu menindaklanjuti pelaporan masyarakat yang berbasis Aplikasi Qlue sudah tercipta dengan baik. Sedangkan. Dengan demikian, maka komunikasi merupakan suatu hal yang mendasar dan menjadi tolak ukur efektifitas pelaksanaan Kualitas Pelayanan Masyarakat Berbasis Aplikasi Qlue dengan memperhatikan aspek struktural, aspek procedural, aspek kultural.

3. Pengaruh Budaya Kerja dan Komunikasi secara bersama-sama terhadap Kualitas Pelayanan Masyarakat Berbasis Aplikasi Qlue Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Berdasarkan hasil pengukuran statistik Persamaan Regresi diketahui bahwa variabel Budaya Kerja dan komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas

Pelayanan Pelaporan Masyarakat Berbasis Aplikasi Qlue di Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan. Dengan demikian, berdasarkan pengukuran persamaan regresi ganda menunjukkan bahwa ternyata kontribusi pengaruh Komunikasi terhadap Kualitas Pelayanan Pelaporan Masyarakat Berbasis Aplikasi Qlue lebih besar daripada kontribusi pengaruh Budaya Kerja terhadap Kualitas Pelayanan Pelaporan Masyarakat Berbasis Aplikasi Qlue, yaitu ($X_2 \rightarrow Y = 0,591 < X_1 \rightarrow Y = 0,546$).

Hasil penelitian ini cukup logis dan dapat diterima, karena komunikasi melalui dimensi aspek struktural, aspek procedural, aspek cultural sebagai cerminan dari karakteristik proses saling berbagi informasi secara bersama dan bertalian antara peserta proses informasi pelayanan pelaporan masyarakat berbasis aplikasi Qlue pada Kantor Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Budaya Kerja adalah mata rantai proses, dimana tiap kegiatan berkaitan dengan proses lainnya atau suatu hasil pekerjaan merupakan suatu masukan bagi proses pekerjaan lainnya. Dengan demikian, maka sangat jelas bahwa Budaya Kerja Aparatur dan Komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pelayanan Pelaporan Masyarakat Berbasis Aplikasi Qlue di Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pandangan yang dikemukakan oleh Zeithaml, et al. (1990:42), sebagai berikut bahwa:

“dua dimensi penilaian kualitas pelayanan. *Pertama*, penilaian kualitas pelayanan dari dimensi konsumen atau masyarakat. *Kedua*, penilaian kualitas pelayanan dari dimensi kemampuan menyajikan pelayanan dari tingkat pimpinan atau manajer hingga tingkat karyawan (*front line service*).”

Mengacu pada konteks teoritis di atas, maka sangat jelas bahwa budaya kerja dan komunikasi berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pelaporan masyarakat berbasis aplikasi Qlue di Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan.

Penutup

Dari temuan hasil penelitian, pembahasan dan pokok-pokok kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran-saran yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pelaporan masyarakat berbasis aplikasi Qlue di Kelurahan Tanjung Duren Utara, disarankan kepada Pimpinan atau Kepala Kelurahan agar dapat dilakukan upaya peningkatan Budaya Kerja Aparatur dengan meliputi pandangan kerja, sikap kerja dan perilaku kerja. Peningkatan budaya kerja tersebut antara lain dapat dilakukan dengan mengadakan Pelatihan Fungsional Aparatur secara berjenjang dan berkelanjutan.
2. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pelaporan masyarakat berbasis aplikasi Qlue di Kelurahan Tanjung Duren Utara, disarankan agar dilakukan upaya peningkatan efektivitas komunikasi pelayanan pelaporan masyarakat berbasis aplikasi Qlue dengan meningkatkan aspek structural, aspek procedural dan aspek kultural. Peningkatan efektivitas komunikasi yang dimaksud antara lain dapat dilakukan dengan mengadakan Kursus Komunikasi Pelayanan Masyarakat.
3. Mengingat bahwa kontribusi pengaruh komunikasi lebih besar dari kontribusi pengaruh budaya kerja, maka peningkatan kualitas pelayanan pelaporan masyarakat berbasis aplikasi Qlue di Kelurahan Tanjung Duren Utara,, dapat diprioritaskan pada peningkatan Komunikasi Aparatur.

Dari temuan hasil penelitian, pembahasan dan pokok-pokok kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran-saran yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pelaporan masyarakat berbasis aplikasi Qlue di Kelurahan Tanjung Duren Utara, disarankan kepada Pimpinan atau Kepala Kelurahan agar dapat dilakukan upaya peningkatan Budaya Kerja Aparatur dengan meliputi pandangan kerja, sikap kerja dan perilaku kerja. Peningkatan budaya kerja tersebut antara lain dapat dilakukan dengan mengadakan Pelatihan Fungsional Aparatur secara berjenjang dan berkelanjutan.
2. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pelaporan masyarakat berbasis aplikasi Qlue di Kelurahan Tanjung Duren Utara, disarankan agar dilakukan upaya peningkatan efektivitas komunikasi pelayanan pelaporan masyarakat berbasis aplikasi Qlue dengan meningkatkan aspek structural, aspek procedural dan aspek kultural. Peningkatan efektivitas komunikasi yang dimaksud antara lain dapat dilakukan dengan mengadakan Kursus Komunikasi Pelayanan Masyarakat.
3. Mengingat bahwa kontribusi pengaruh komunikasi lebih besar dari kontribusi pengaruh budaya kerja, maka peningkatan kualitas pelayanan pelaporan masyarakat berbasis aplikasi Qlue di Kelurahan Tanjung Duren Utara,, dapat diprioritaskan pada peningkatan Komunikasi Aparatur.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Mafri 1999, *Etika Komunikasi Massa Dalam Pandangan Islam*, Jakarta : Logos.
- Al Rasyid, Harun, 2000: *Statistik Sosial*, Program Pascasarjana, UNPAD, Bandung.

- Arikunto, Suharsini. 1998, *Prosedur Penelitian – Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta
- , 1995, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Ancok, Djameludin, 1992, *Teknik Penyusunan Skala Pengukuran* (Seri Metodologi No. 9), Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1990. *Dasar-dasar Administrasi Negara*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Azwar, Saifuddin. 1997. *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basuki, Johannes, 1997, *Budaya Organisasi (Konsep dan Terapan)*, Jakarta : Yayasan Pembina Manajemen.
- Bollen, K.A. 1989. *Structural Equation With Latent Variabels*. John Wiley and Sons, New York
- Brelin, H.K.Davenport, K.S.,Jennings, L.P.and Murphy, P.F.,1997, *Focused Quality, Meningkatkan Mutu Produk Dengan Hasil Nyata*, Terjemahan Edi Nugroho, Jakarta : PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Chiesa, V. & R. Manzini, 1997, *Competence Levels within Firms : A Static and Dynamic Analysis*, Dalam Heene, Aime & Ron Sanchez (editors), *Competence-based Strategic Management*, New York : John wley & Sons.
- Cresswall, J.W., 1994, *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*, London : Sage
- Dharma, Surya, 2002, *Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi*, dalam Soetjipto, Budi, et.al., 2002, *Paradigma Baru- Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : Amara Books.
- _____, 2005, *Manajemen Kinerja, Falsafah Teori dan penerapan*, Jakarta : Pustaka Pelajar
- Dwiyanto, Agus, 2005, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Jakarta, Gadjah Mada University Press
- Erliana, Hasan. 2014. *Komunikasi Pemerintahan. Tangerang Selatan. Universitas Terbuka.*
- Ghozali Imam, 2004, *Model Persamaan Structural Konsep dan Aplikasi dengan Program AMOS Versi 5.0*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Gibson, Ivancevich & Donnelly, 1999. *Organisasi Perilaku Struktur Proses*. (Alih Bahasa : Agus Darma), Jakarta: Penerbit Erlangga.
- _____, 1996, *Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses*, Edisi Kedelapan Jilid Satu, Terjemahan Nunuk Ardiani, Jakarta : Binarupa Aksara.
- Handayaniingrat, Soewarno, 1989, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta : CV. Haji Mas Agung.
- Hersey, Paul dan Ken Blanchard. 1995. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mayo, Andrew, 2001, *The Human Value of the Enterprise*, USA : Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
- Martin, Anthony Dio, 2002, *Human Resource Kompetensi Model Tren Baru Revitalisasi SDM*, dalam Soetjipto, Budi, et.al., 2002, *Paradigma Baru- Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : Amara Books.
- Maryono, 1978, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Moenir, H.A.S., 2000, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Nasir, Moh, 1999, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Hadari, 1998, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Nursanti, Tinjung Desy, 2002, *Strategi Terintegrasi dalam Perencanaan SDM yang Efektif*, dalam Soetjipto, Budi, et.al, 2002, *Paradigma Baru- Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : Amara Books.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997, *Budaya Organisasi*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- _____, 2005, *Teori Budaya Organisasi*, Jakarta : PT.Rineka Cipta
- _____, 2007, *Kybernologi Sebuah Profesi*, Jakarta : PT.Rineka Cipta
- Effendy, Onong Uchjana, 1993, *Human Relations dan Public Relations*, Bandung : Mandar Maju.
- _____, 1989, *Kamus Komunikasi*. Bandung:Mandar Maju.
- _____, 1983, *Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung:Bina Aksara.

- _____, 1992, *Dinamika Komunikasi*, Bandung : Rosdakarya
- Ratminto, dan Atik Septi Winarsih, 2005, *Manajemen Pelayanan*, Jakarta, Pustaka Pelajar.
- Rencher, Alvin C, 2002. *Method of Multivariate Analysis 2rded.* , USA :A John Wiley & Sons, Inc. Publication
- Riduwan dan Akdon, 2006, *Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika*, Bandung : Alfabeta.
- Rivai, Veithzal, 2004, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Ruben D. Brent and Stewart, P. Lea, 1998. *Commucation and Human Behavior*, United State of America: Allyn and Bacon.
- Robins, Stephen P, 1996, *Perilaku Organisasi-Konsep, Kontroversi, Aplikasi*, Jakarta : PT. Prenhallindo.
- _____, 1994, *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*. Jakarta : Arcan.
- Sendjaja, Djuarsa, 1999, *Pengantar Komunikasi*, Modul Universitas Terbuka.
- _____, 1999, *Teori Komunikasi*, Modul Universitas Terbuka.
- Santoso, Singgih, 1999. *SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Sembiring, R.K. 1995,. *Analisis Regresi Edisi Kedua*, Bandung:ITB
- Shermon, Ganesh, 2004, *Competency based HRM*, India : Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited.
- Setyawan, Ignatius Roni, 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategis : Repositioning Peran Perilaku Plus Kompetensi serta Peran SDM Strategis*, dalam Soetjipto, Budi, et.al., 2002, *Paradigma Baru-Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : Amara Books.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES
- Siagian, Sondang P, 1983, *Bunga Rampai Management Modern*. Jakarta : Gunung Agung.
- _____, 1996, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung.
- _____, 1998, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Bumi Aksara.
- _____, 2002, *Kiat Meningkatkan Produktivitas*. Jakarta : Penerbit : Rineka Cipta.
- Soetopo, 1999, *Pelayanan Prima*, Jakarta, STIA LAN Presss.
- Spencer, Lyle, M. Jr. And Spencer, M.Signe. 1993. *Competence At Work Models For Superior Performance*, United State of America: John Wiley & Sons, Inc.
- Sudjana. 1996. *Metoda Statistika*. Bandung : Penerbit "TARSITO".
- Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : CV. Alfabeta.
- _____, 2003, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung : CV. Alfabeta.
- Sugiyanti, Sutopo, 1990, *Pelayanan Prima*, Jakarta, LAN.
- Suradinata, 1996, *Manajemen Sumber Daya Manusia-Suatu Tinjauan Wawasan Masa Depan* , Bandung : CV. Ramadan.
- _____, 1998, *Manajemen Pemerintaban dan Otonomi Daerah*, Bandung : CV. Ramadan.
- Supranto, J. 1987. *Statistik-Teori dan Aplikasi*, Jakarta : Erlangga.
- _____, 1997. *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk Menaikkan Pangsa Pasar*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Terry, George R, 1979, *Principles of Management*, terjemahan oleh Winardi, Alumni : Bandung.
- Thoha, Miftah, 1996, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 1998, *Birokrasi Indonesia Dalam Era Globalisasi*, Jakarta : Batang Gadis.
- Tjiptono, Fandy, 1998. *Manajemen Jasa*, Yogyakarta : Penerbit Andy.
- _____. 1998. *Strategi Pemasaran-Edisi 2*, Yogyakarta: Penerbit Andy.
- Triguno, 1999, *Budaya Kerja - Menciptakan Lingkungan Yang Kondusive Untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta : PT. Golden Terayon Press.
- Umar, Husein, 1999, *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Vroom, Victor H. 1964. *Work and Motivation*. New York: John Wiley and Sms Inc.
- Wexley, Kenneth N, dan Gary A. Yukl, 1992, *Perilaku Organisasi Dan Psikologi Personalial*, Jakarta : P.T. Rineka Cipta.

- Winardi, J., 2004, *Manajemen Perilaku Organisasi*, Jakarta : Prenada Media
- Zeithaml, Valarie. A Parasuraman, L, Leonard A. Berry, 1990, *Delivering Quality Service: Balancing Customer Perception and Expectation*, New York, The Free Press Advision of Mac Millan Inc.
- Sumber Lain:
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 2086 Tahun 2006 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
- Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
- Lilianti Juliah Suhendra, Tesis, 2007, *Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor*, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI) Jakarta
- Rusnani, 2007, *Kualitas Pelayanan Pada Instalasi Rawat nap RSAB Harapan Kita – Analisis Hubungan Antara Kualitas Pelayanan Dengan Kepuasan Pasien Pada Instalasi Rawat Inap RSAB Harapan Kita*, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta (STIA-LAN)..
- Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tindak Lanjut Evaluasi Respon Opini Publik;
- Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 223 Tahun 2015 tentang Penggunaan Aplikasi Jakarta Smart City di Lingkungan Pemerintah Provinsi

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGRAJIN TAS SULAM DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI GAMPONG DAYAH DABOH KECAMATAN MONTASIK KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI ACEH

Muhammad Suhajat¹

¹Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta

email : 'mbajat203@gmail.com

*Paper Accepted: 20 Juni 2025
Paper Reviewed: 24-30 Juni 2025
Paper Edited: 01-08 Juli 2025
Paper Approved: 23 Juli 2025*

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat melalui usaha industri kerajinan tas sulam Aceh merupakan proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan sehingga perlu adanya dukungan dari pemerintah, agar mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Desa. Masalahnya bagaimana pemberdayaan masyarakat pengrajin tas sulam Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan di Gampong Dayah Daboh Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat pengrajin tas sulam dalam meningkatkan kesejahteraan, faktor pendukung dan penghambat, dan strategi pemberdayaan masyarakat pengrajin tas sulam dalam meningkatkan kesejahteraan di Gampong Dayah Daboh Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dan serta Analisa SWOT dan litmus test untuk menentukan prioritas strategi yang akan dilakukan untuk keberhasilan pemberdayaan pengrajin tas sulam Aceh. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara serta telaahan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum sarana masih kurang dan kurangnya pendampingan dari pemerintah Kabupaten Aceh Besar, pihak Pemda belum bisa membantu secara optimal dalam bidang sarana karena harus fokus pada penanganan Covid-19, selanjutnya adanya keterbatasan promosi dari pemerintah Gampong Dayah Daboh pada masa new normal. Faktor pendukung diantaranya adalah dukungan dari pemerintah Gampong untuk keberlangsungan usaha. Strategi yang diterapkan antara lain strategi S-O, mempertahankan kualitas produk, strategi W-O Meningkatkan promosi dalam pemasaran dan strategi S-T meningkatkan produksi dan penjualan produk.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Tas Sulam Aceh, Faktor Pendukung dan Penghambat, Strategi Pemberdayaan

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pendidikan nonformal untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat lebih berkembang melalui suatu peningkatan keterampilan yang dimiliki atau

ada . Pemberdayaan dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat yang meliputi kesejahteraan keluarga, memandirikan masyarakat miskin, mengangkat harkat dan martabat masyarakat lapisan bawah, menjadikan masyarakat sebagai

subjek dalam bertindak. Pemberdayaan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah setempat. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diciptakan program pemberdayaan di pedesaan sehingga mampu mensejahterakan keluarga dan masyarakat.

Program pemberdayaan bisa dilakukan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dalam bentuk pelatihan. Dalam hal ini diperlukan pembinaan-pembinaan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun instansi terkait kepada masyarakat dalam upaya kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Pemberdayaan merupakan bentuk dari proses perubahan sosial menuju ke arah masyarakat yang hidup lebih baik dan sejahtera. Salah satu ciri utama dari pemberdayaan adalah menitikberatkan pada peran dan partisipasi masyarakat sejak dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pemeliharaan. Pemerintah dan instansi lain mempunyai tugas sebagai fasilitator dan motivator bagi masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan.

Tujuan yang akan dicapai melalui usaha pemberdayaan masyarakat, adalah masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan. Dalam jurnal internasional pemberdayaan masyarakat adalah:

“Community empowerment is a term describing a participative and developmental approach to local decision making, “through which marginalized or oppressed community members and groups acquire valued resources and basic rights, and achieve greater control over their lives and environment.

Pemberdayaan masyarakat menggambarkan pendekatan partisipatif dan pengembangan pengambilan keputusan lokal, “di mana anggota dan kelompok masyarakat

yang terpinggirkan atau tertindas memperoleh sumber daya dan hak-hak dasar yang berharga, dan mencapai kontrol yang lebih besar atas kehidupan dan lingkungan mereka. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan berhak memperoleh sumber daya dan hak dasar yang berharga, guna meningkatkan taraf hidupnya menjadi yang lebih baik. Perguliran era reformasi ternyata belum memberikan hasil positif pada kehidupan berbangsa di Indonesia. Fenomena kemiskinan yang terjadi di masyarakat kita masih menghantui pembangunan di Indonesia umum dan Provinsi Aceh Khususnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh antara lain pendidikan, Teori human capital menjelaskan pentingnya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan peningkatan pendidikan, sumberdaya manusia yang berkualitas dapat memberikan multiplier effect terhadap pembangunan suatu daerah, khususnya pembangunan bidang ekonomi. Apabila kualitas sumberdaya manusia dapat ditingkatkan melalui pendidikan, maka produktivitas penduduk akan meningkat. Ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan. Bagi sebagian besar mereka, yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh waktu (part time) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Mereka yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah ke atas.

Jumlah UMKM di Provinsi Aceh tahun 2019 mencapai 74. 810 UMKM yang bergerak di berbagai sektor.selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Data Jumlah UMKM Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumah UMKM
1	Aceh Selatan	3.251
2	Aceh Tenggara	1.245
3	Aceh Timur	5.891
4	Aceh Tengah	2.719
5	Aceh Barat	2.011

No	Kabupaten/Kota	Jumah UMKM
6	Aceh Besar	4.456
7	Pidie	1.545
8	Aceh Utara	3.660
9	Simeulue	2.088
10	Aceh Singkil	1.474
11	Bireun	6.998
12	Aceh Barat Daya	2.262
13	Gayo Lues	996
14	Aceh Jaya	1.212
15	Nagan Raya	6.451
16	Tamiang	2.948
17	Bener Meriah	1.011
18	Pidie Jaya	5.579
19	Banda Aceh	9.591
20	Sabang	2.171
21	Lhoksumawe	2.354
22	Langsa	3.579
23	Subulussalam	1.318
	Jumlah	74.810

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Prov, 2019

Pemberdayaan masyarakat dianggap penting mengingat mata pencaharian penduduk Kabupaten Aceh Besar yang mayoritas bekerja di sektor pertanian, kemudian akan beralih fungsi sebagai pelaku usaha dalam bidang pariwisata. Oleh karena itu, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan haruslah berjalan secara maksimal guna mencapai tujuan dari ditetapkannya kebijakan tersebut. Permasalahan pemberdayaan masyarakat ditinjau dari aspek ekonomi diantaranya adalah kurang berkembangnya sistem kelembagaan ekonomi untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat khususnya masyarakat kecil dalam mengembangkan kegiatan usaha ekonomi kompetitif. Kurangnya penciptaan akses masyarakat terhadap input sumber daya ekonomi berupa modal, lokasi berusaha, lahan usaha, informasi pasar, dan teknologi produksi. Lemahnya kemampuan masyarakat kecil untuk membangun organisasi ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan posisi

tawar dan daya saingnya. Ditinjau dari aspek sosial, permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat adalah kurangnya upaya yang dapat mengurangi pengaruh lingkungan sosial budaya yang mengungkung masyarakat pada kondisi kemiskinan struktural. Kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan termasuk informasi. Kurang berkembangnya kelembagaan masyarakat dan organisasi sosial yang dapat menjadi sarana interaksi sosial. Belum mantapnya kelembagaan yang dapat memberikan pertahanan dan perlindungan bagi masyarakat yang terkena dampak kritis ekonomi dan belum berkembangnya kelembagaan yang mampu mempromosikan asas kemanusiaan, keadilan, persamaan hak, dan perlindungan bagi masyarakat rentan.

Tantangan utama dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana membangun kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapat lapangan kerja dan pendapatan yang layak, martabat dan

eksistensi pribadi, kebebasan menyampaikan pendapat, berkelompok dan berorganisasi, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Secara khusus tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memperbaiki iklim ekonomi regional dan kegiatan ekonomi riil yang kondusif serta dapat menjamin kegiatan usaha ekonomi masyarakat lebih kompetitif dan menguntungkan. Hal ini erat dengan upaya untuk memberikan akses masyarakat kedalam sumberdaya ekonomi, pengembangan organisasi ekonomi yang dikuasai oleh pelaku ekonomi kecil, dan meningkatkan bantuan fasilitas bantuan teknis dan perlindungan bagi usaha masyarakat kecil.

Penelitian ini lebih lanjut akan membahas mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah Gampong Dayah Daboh yang bergerak di bidang souvenir tas sulam Aceh. Terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi industri kecil, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam sangat mempengaruhi Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) ini sendiri walaupun sudah memiliki beberapa produk unggulan tetapi masih kurang kreatif.

Keberadaan pengrajin tas sulam Aceh di Gampong Dayah Daboh juga sangat penting sebagai tempat mata pencaharian bagi sebagian masyarakat Gampong Dayah Daboh khususnya dan Kecamatan Montasik umumnya. Namun dalam melaksanakan kegiatan produksinya, banyak kendala yang sering dihadapi oleh para pengrajin. Kendala tersebut seperti masalah permodalan, kemampuan sumber daya manusia, serta pemasaran. Modal atau dana yang kurang, dapat menjadikan para pelaku usaha tidak bisa melanjutkan ke proses produksi yang selanjutnya. Kemampuan, kreativitas, inovasi serta keuletan dari para pengrajin sangat dibutuhkan untuk menghasilkan suatu karya kerajinan yang tidak monoton dan dapat bersaing dengan karya yang lainnya sehingga memiliki nilai jual di pasaran. Keadaan tersebut yang sering menjadi kendala dan menjadikan beberapa tempat usaha kerajinan mengalami gulung tikar. Para pengrajin yang tidak mampu bertahan dan berkembang maka akan berdampak pada kondisi terburuk apalagi di musim pandemi sekarang. Menghadapi keadaan seperti ini tentunya peran pemerintah sangat diperlukan. Perlu diketahui bagaimana

langkah yang dilakukan pemerintah untuk terus mengembangkan dan memberdayakan produk yang menjadi ciri khas Gampong Dayah Daboh agar tetap bertahan. Adanya perkembangan daerah yang semakin pesat diharapkan dapat meningkatkan pula perekonomian masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka mendorong kami untuk melakukan penelitian tentang “Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Tas Sulam dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Gampong Dayah Daboh Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh”.

Perumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah

- 1) Bagaimanakah pemberdayaan masyarakat pengrajin Tas Sulam dalam meningkatkan kesejahteraan di Gampong Dayah Daboh Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh?
- 2) Apa sajakah faktor-faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat pengrajin Tas Sulam dalam meningkatkan kesejahteraan di Gampong Dayah Daboh Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh?
- 3) Bagaimanakah Strategi mengatasi faktor-faktor penghambat pemberdayaan masyarakat pengrajin Tas Sulam dalam meningkatkan kesejahteraan di Gampong Dayah Daboh Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh?

METODE PENELITIAN

Penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan temuan yang diamati. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bersifat menggambarkan suatu fenomena, peristiwa dan gejala. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan

pada kondisi yang alamiah, disebut juga sebagai metode etnografi. Penelitian kualitatif dilakukan pada objek alamiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Alasan pemilihan desain tersebut adalah agar peneliti dapat memperoleh data dan informasi yang valid di lapangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian mendeskripsikan hasil yang diperoleh serta menganalisisnya berdasarkan teori yang relevan.

Data Primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data atau informan terkait Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin di Gampong Dayah Daboh. Sementara itu, data sekunder diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti data daerah dalam angka yang bersumber dari Biro Pusat Statistik (BPS), Laporan, Jurnal, Buku, Sumber Internet dan lainnya.

Dalam hal ini data yang di dapatkan berasal dari :

1. BPS Kabupaten Aceh Besar
2. Dinas DPMG dan UMKM
3. Dekrasnasda Aceh Besar
4. Ketua Pengrajin Tas Sulam
5. Kasi dalam pelaksanaan industry pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan
6. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode interview (wawancara); observasi; dan dokumentasi Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknis analisis data berdasarkan pendapat Miles dan Huberman tersebut, dimana peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi

Landasan Teoritis

1. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Putridiani (2019) Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat, inovasi dalam membuat kerajinan tenun, dan faktor-faktor pendukung serta penghambat keberhasilan pemberdayaan masyarakat sentra kerajinan tenun di Desa Wisata Gamplong. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif metode studi kasus. Sumber data yang diteliti adalah ketua paguyuban “TEGAR”, pengelola rumah kerajinan, dan pengrajin tenun. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara, pedoman observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi data, sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan pengrajin tenun di Sentra Kerajinan desa wisata Gamplong yaitu melakukan pelatihan, melakukan pendampingan, dan evaluasi. Inovasi yang dilakukan yaitu inovasi produk yang menghasilkan design unik dan baru untuk diaplikasikan pada kerajinan tenun. Faktor pendukungnya ialah adanya even-even, potensi alam, kerajinan tenun, dan ATBM. Sedangkan faktor penghambat yaitu minimnya dukungan dari masyarakat, generasi penerus dan persaingan harga

Penelitian Kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2018) yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Sepatu Kulit Bunut Oleh Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Asahan” yang bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat pengrajin sepatu kulit, faktor pendukung dan penghambat dalam memberdayakan pengrajin sepatu kulit dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dalam memberdayakan masyarakat pengrajin sepatu kulit di Kabupaten Asahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Penelitian Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sam Samon (2019) yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui

Pengelolaan Kain Tenun Oleh Pemerintah Desa Kalike Tahun 2018 (Penelitian di Desa Kalike, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur)” Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Bustanul Aulia (2018) yang berjudul Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kerajinan Batik Tulis Giriloyo Wukirsari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk mendeskripsikan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kerajinan batik tulis. Penelitian Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Bambang Mursito (2012), yang berjudul pemberdayaan Pengrajin Mebel di Desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. Penelitian Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Riyanto (2018) yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Industri Kerajinan Patung Batu Di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk mendapat akses dan kontrol atas sumber-sumber hidup yang penting. Konsep pemberdayaan pada dasarnya dibangun dari ide yang menempatkan manusia sebagai subyek dari dunianya sendiri. Terdapat dua kecenderungan proses pemberdayaan yaitu pertama adalah proses pemberdayaan yang menekankan ke proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan yang kedua adalah lebih menekankan melalui proses dialog. Kecenderungan ini terkait dengan kemampuan individu untuk mengontrol lingkungannya

Dalam jurnal internasional pemberdayaan adalah:

“The concept of empowerment has been developed and employed in a wide array of definitions in social-science research. Friedmann (1992) in Zimmerman (1995) distinguishes between empowering process and empowered outcomes. The first refers to

hoe people, organizations, and communities become empowered, and the latter refers to the consequences of those processes. The concept of empowerment is applicable for those who lacks power of those whose potential is not fully developed in improving the quality-of-life, including urban poor. This concept encourages the poor to reacquire the power and control over their own lives.

Program pembangunan dapat dikategorikan sebagai proses pemberdayaan jika terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat yang bertujuan untuk memberikan akses yang lebih baik ke sumber-sumber daya, terpenuhinya kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan, dan memiliki kemampuan untuk melakukan kontrol sosial terhadap aspek lingkungan.
2. Pengembangan kapasitas masyarakat yang bertujuan untuk mengelola organisasi lokal (self-management).
3. Pengembangan pemikiran kritis masyarakat agar mereka memiliki pemikiran yang lebih kritis terhadap diri dan lingkungannya. Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, namun sering kali ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk mendorong dan meningkatkan semua potensi yang dimiliki masyarakat agar mampu melawan serta melepaskan diri dari jeratan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis .

Beberapa prinsip atau norma yang relevan dengan proses pemberdayaan dalam pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Prinsip Rio yaitu :

1. Prinsip tanggung jawab, yaitu penggunaan sumber daya yang berkelanjutan secara ekologi,

- efisien secara ekonomi dan adil secara sosial.
2. Pengambilan keputusan pada tingkat yang sesuai untuk meningkatkan partisipasi yang demokratis, dan desentralisasi.
 3. Prinsip kehati-hatian, yaitu dengan menyediakan pendidikan dan asuransi.
 4. Manajemen adaptif, yaitu ketika keputusan harus dibuat dalam kondisi ketidakpastian diperlukan adanya informasi mengenai ekologi, sosial dan ekonomi yang terintegrasi serta digunakan secara terus menerus.
 5. Prinsip partisipasi, yaitu dalam prosesnya melibatkan semua kepentingan dan para pihak terkait (stakeholders) dengan hubungan horizontal dan vertikal.

Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Pemberdayaan Masyarakat diantaranya adalah :

- (1) Adanya sarana yang memadai guna mendukung masyarakat untuk mendapatkan SDM semaksimal mungkin.
- (2) Adanya peningkatan partisipasi untuk berusaha meningkatkan pengembangan.
- (3) Meningkatnya jumlah SDM
- (4) Adanya dukungan langsung dari pemerintah

Faktor Pendukung Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat beberapa faktor yang mendukung pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah:

1. Motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri seorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, penghargaan dan penghormatan. Motivasi adalah sesuatu apa yang membuat seseorang bertindak.
2. Kebijaksanaan Pemerintah. Kebijaksanaan pemerintah, baik yang dikeluarkan melalui

perundang-undangan, peraturan-peraturan pemerintah, surat-surat keputusan menteri dan pejabat pemerintah, dan sebagainya adalah merupakan arahan yang harus diperhitungkan oleh organisasi dalam pengembangan sumber daya manusia.

Faktor pendukung pemberdayaan pengrajin :

- (1) Adanya dukungan dari warga, pemerintah dan fasilitas yang memadai,
- (2) Saling memotivasi, bertukar ide dan gagasan antar anggota dan pengurus,
- (3) Produksi yang semakin meningkat,
- (4) Lokasi yang strategis.

Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah :

1. Anggaran. Suatu rencana yang disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan maneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu.
2. Sarana dan Prasarana, sarana adalah sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya sarana dan prasarana kegiatan masyarakat dalam pemberdayaan tersebut tidak terlepas dari rendahnya sumber daya manusia itu, hal ini karena masyarakat di desa sangatlah sederhana dan belum memahami hal-hal yang berkaitan dengan keinginan masyarakat.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam paradigma pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Kesenjangan dan ketimpangan dalam

kehidupan masyarakat di akibatkan oleh keberhasilan pembangunan ekonomi yang tanpa disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat

Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah alat yang digunakan untuk melakukan analisis strategis. Analisis SWOT adalah instrument perencanaan strategis yang klasik. Dengan menggunakan kerangka kerja kekuatan dan kelemahan, eksternal peluang dan ancaman yang ada maka instrumen ini memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik untuk melakukan sebuah strategi. Instrumen ini membantu para perencana atau stake holder tentang apa yang bisa dicapai

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan masyarakat pengrajin Tas Sulam dalam meningkatkan kesejahteraan di Gampong Dayah Daboh Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 1 Ayat 12 disebutkan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua bidang, mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi, dan pendidikan.

Menurut Isbandi Rukminto Adi aspek yang mendasari pemberdayaan masyarakat antara lain adalah adanya sarana yang memadai guna mendukung masyarakat untuk mendapatkan SDM semaksimal mungkin, adanya peningkatan partisipasi untuk berusaha meningkatkan pengembangan, meningkatnya jumlah SDM dan adanya dukungan langsung dari pemerintah.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini

Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasinya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi.

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini pihak pemberdaya/aktor/pelaku pemberdayaan masyarakat berusaha menciptakan prakondisi, agar dapat mem-fasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Pada tahap ini masyarakat perlu diberi keyakinan tentang manfaat yang akan diperoleh dari usaha kerajinan tas sulam Aceh. Salah satu tahapan pemberdayaan masyarakat adalah tahap penyadaran masyarakat. Tahapan kegiatan ini dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang keberadaannya baik sebagai individu dan anggota masyarakat maupun kondisi lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya, ekonomi dan politik. Termasuk juga di dalamnya upaya menunjukkan adanya masalah yang berkaitan dengan keadaan sumber daya dan lingkungan mereka. Selain itu juga dilakukan analisis bersama menyangkut potensi, faktor penyebab terjadinya masalah terutama kelemahan internal dan ancaman eksternal untuk selanjutnya merumuskan alternatif pemecahan terbaik yang dapat dilakukan. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah menunjukkan pentingnya perubahan untuk memperbaiki keadaan.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu narasumber yaitu Kepala Desa

Gampong Dayah Daboh berdasarkan hasil wawancara, dimana dapat disimpulkan bahwa pengrajin menyulam dan menjahit bordir sulam Aceh hanya dua hari dalam satu minggu. Ini yang menyebabkan lambatnya proses penyelesaian tas sulam Aceh dan kurangnya kesadaran bagi teman-teman dalam kelompok untuk hadir setiap dua hari yang sudah menjadi kesepakatan bersama yaitu hari jumat dan sabtu, atau kapan ada waktu saja, bahkan disaat musim sawah tidak datang sama sekali. Hal ini diperkuat oleh pernyataan seorang pengrajin yang menyebutkan bahwa mereka memilih datang pada hari dimana tidak ada kegiatan lain, karena ada anggota pengrajin yang mempunyai aktivitas lain yang utama seperti pendidikan dan menjadi pegawai kontrak. Partisipasi masyarakat sangat tidak baik untuk saat ini, banyak masyarakat yang menjadikan kegiatan pengrajin tas sulam Aceh ini adalah kegiatan yang termakan waktu diluar pekerjaan mereka, cukup disayangkan apabila tidak ada yang ingin berpartisipasi dalam melestarikan budaya yang cukup kuat di lingkungan masyarakat tersebut. Relasi yang akan dibangun juga akan menjadi lebih baik apabila masyarakat sadar akan kegunaan dan manfaat ketika menjadikan kegiatan menyulam tas Aceh ini sebagai peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat Gampong Dayah Daboh.

b. Tahap Pengkajian

Tahap assessment dilakukan dengan identifikasi masalah ataupun kebutuhan dan juga sumber daya yang dimiliki oleh kelompok sasaran. Pengkajian dilakukan dengan berembug atau bermusyawarah dengan pengrajin tas sulam Aceh dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Gampong Dayah Daboh. Dari hasil pengidentifikasian masalah didapatkan hasil bahwa permasalahannya adalah masih kurangnya dukungan seluruh elemen masyarakat dalam mencari relasi atau

mitra yang dapat menampung hasil kerajinan tas sulam Aceh. Berdasarkan pada hasil wawancara diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Pemerintah Gampong Dayah Daboh sangat memberikan dukungan penuh terhadap kelompok pengrajin dan sama-sama mencari jalan atau relasi untuk menjual hasil kerajinan tas Sulam Aceh dalam menjaga asa lajunya usaha kerajinan kelompok tas sulam Aceh, Pemerintah Gampong juga sudah membuka hubungan kerjasama dengan dewan kerajinan nasional daerah (Dekranasda), guna membahas soal pemasaran kerajinan tas sulam Aceh, sehingga dapat menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gampong Dayah Daboh.

c. Tahap perencanaan

Dalam tahapan ini para pelaku perubahan tersebut berupaya untuk menggerakkan warga untuk dapat lebih partisipatif. Para pengambil kebijakan desa atau aparatur desa berpartisipasi dan menentukan program pemberdayaan dari permasalahan yang dihadapi. Kebutuhan akan penghasilan bulanan yang nantinya dapat memperbaiki perekonomian pengrajin diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan melalui penguatan ekonomi dengan membuat kerajinan tas sulam Aceh.

d. Tahap Performalisasi

Dalam tahapan ini para pelaku perubahan akan membantu kelompok sasaran untuk menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan guna mengatasi permasalahan yang dihadapi.

e. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan ini terdiri dari berbagai kegiatan pelatihan untuk menambah atau memperbaiki pengetahuan dan kemampuan teknis, ketrampilan manajerial, dan perubahan sikap/wawasan. Pengembangan kegiatan terutama yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan penting untuk membangun kemandirian dan menumbuhkan

keyakinan masyarakat bahwa pemberdayaan yang dilakukan mampu memperbaiki kehidupan mereka. Pengembangan yang merupakan suatu kegiatan agar mendapat pendapatan serta kesejahteraan bagi masyarakat Gampong Dayah Daboh juga merupakan suatu sektor ekonomi yang berdikari.

Faktor Pendukung dan Penghambat pengrajin Tas Sulam dalam meningkatkan kesejahteraan di Gampong Dayah Daboh Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh

- a. Adanya dukungan dari warga dan juga pemerintah dalam membangun kerjasama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat Gampong Dayah Daboh dalam memanfaatkan kebudayaan. Dukungan itu berupa segala macam ide yang tertuang dari masyarakat dan juga akan disampaikan ke pemerintah.
- b. Saling bertukar pikiran antar warga yang mendorong untuk tetap bersinergi dan menjalin Integritas agar tetap intens dalam pengembangan dan juga interaktif dalam komunikatif. Penukaran gagasan ini juga sangat mempengaruhi kerajinan dan juga wawasan dalam setiap pola pikir dari para pengrajin terkait produksi yang akan dilakukan.
- c. Produksi yang semakin meningkat juga menjadi faktor pendukung bagi masyarakat Gampong Dayah Daboh, karena sistem produksi yang terus meningkat, maka dari itu pemerintah

harus turun tangan dalam memfasilitasi agar tetap stabil pengerjaannya dan juga efisien. Produksi yang semakin meningkat ini juga menjadi kuat karena pemasaran yang dilakukan oleh Masyarakat Gampong Dayah Daboh untuk melestarikan kebudayaan Aceh.

Strategi mengatasi faktor-faktor penghambat pemberdayaan masyarakat pengrajin Tas Sulam dalam meningkatkan kesejahteraan di Gampong Dayah Daboh Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh

Sesuai dengan peraturan Bupati 28 tahun 2020, penggunaan dana Desa tahun 2021 diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi nasional yang terkena dampak pandemi Covid-19 termasuk didalamnya diberikan untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Dayah Daboh yang diberikan melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

Implementasi kebijakan pengembangan Desa yang kreatif suatu kebijakan yang dilakukan oleh Dekrenasda, untuk mengimplementasikan kebijakan ini maka diperlukan keseriusan dan komitmen keterpaduan antar organisasi yang terlibat sebagai pelaksana kebijakan.

Dari hasil wawancara dan tanggapan yang diberikan oleh informan untuk itu perlu merumuskan strategi langkah-langkah dalam pemberdayaan pengrajin tas sulam Aceh maka dilakukan Analisa SWOT terhadap faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal tersebut. Analisis SWOT akan menganalisis lingkungan internal yaitu strengths (kekuatan) dan weakness (kelemahan) serta lingkungan eksternal yaitu opportunities (peluang) dan threats (ancaman).

Tabel 4.3.1
Matrik SWOT Perumusan Alternatif Langkah Strategis pemberdayaan pengrajin Tas Sulam Aceh

INTERNAL	<i>Strenght (S)</i>	<i>Weakness (W)</i>
EKSTERNAL	1 Kualitas produk yang dihasilkan baik	1 Produksi menurun akibat Pandemi covid-19
	2 Dukungan dari pemerintah	2 Tidak adanya bantuan dana
	3 Partisipasi masyarakat baik	3 Masih banyak menggunakan desain lama
		4 Masih ada yang belum mendapatkan bantuan mesin jahit
<i>Opportunities (O)</i> Potensi lokasi yang mendukung usaha Peluang pasar yang luas Memiliki mitra kerja dengan pihak lain Keberadaan atau bantuan lembaga pemerintah	Strategi S-O Mempertahankan kualitas produk Kerajinan Tas sulam Aceh (S1, O1,O2)	<i>Strategi W-O</i> Meningkatkan promosi dalam pemasaran (W1, O3,O4)
<i>Threats(T)</i> Pengaruh masuknya pesaing Permintaan pasar tidak stabil Terjadinya fluktuasi harga bahan baku akibat pandemi Keadaan alam tidak menentu	Strategi S-T Meningkatkan produksi dan penjualan produk (S2, T1, T3)	Strategi W-T Menggunakan teknologi yang lebih modern (W4, T1, T2, T3)

Berdasarkan Tabel 4.4 matrik SWOT diperoleh strategi yang dapat dijadikan sebagai alternatif strategi pengembangan usaha kerajinan Tas Sulam di Desa Dayah Daboh. Berikut adalah alternatif yang dapat dipergunakan sebagai strategi pengembangan:

1. Strategi S-O, mempertahankan kualitas produk Kerajinan tas sulam Aceh. Faktor yang berpengaruh O1,O2. sehingga dapat mengambil peluang yang ada dan dapat meningkatkan keuntungan. Pengambilan alternatif strategi tersebut karena dalam mempertahankan kualitas produk kerajinan tas sulam Aceh

- diperlukan lokasi yang mendukung usaha dan peluang pasar yang luas
2. Strategi S-T meningkatkan produksi dan penjualan produk. Faktor yang berpengaruh T1, T3, karena dengan adanya peningkatan produksi dan penjualan produk untuk menghadapi besarnya pesaing dan juga fluktuasi harga bahan baku akibat pandemi Covid-19.
3. Strategi W-O Meningkatkan promosi dalam pemasaran. Faktor yang berpengaruh adalah W1, dan O3, O4, yaitu Memiliki mitra kerja dengan pihak lain dan

- adanya keberadaan atau bantuan lembaga pemerintah
4. Strategi W-T Menggunakan teknologi yang lebih modern terutama dari finishing. Faktor yang berpengaruh adalah T1, T2, T4, karena dengan adanya teknologi yang lebih modern keadaan alam yang tidak menentu bisa teratasi.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan peningkatan kesadaran masyarakat telah dilakukan terhadap pengrajin tas sulam di gampong Dayah Daboh. Tingkat produktivitas yang dilakukan oleh warga untuk memproduksi tas Sulam Aceh masih sangat minim dengan pengelolaan yang sangat lama dikarenakan kurangnya alat-alat yang bagus dan modern. Pemberdayaan masyarakat di Gampong Dayah Daboh pada usaha kerajinan tas sulam Aceh tidak berhasil di karenakan banyak kelompok pengrajin yang masih belum bisa melanjutkan produksinya akibat beberapa kendala. Meskipun pemberdayaan telah dilakukan namun pendapatan pengrajin tas masih sangat minim, dikarenakan kurangnya koordinasi antara Pemerintah Gampong Dayah Daboh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam mencari solusi pemasaran.
2. Salah satu faktor pendukung yang sangat diperlukan adalah adanya dukungan dari pemerintah desa dalam mengembangkan kerajinan Tas Sulam Aceh. Hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya yang

dilakukan dalam hal pembinaan dan pelatihan sumberdaya manusia. dan faktor yang menghambat pemberdayaan masyarakat pengrajin Tas Sulam adalah kurangnya pendampingan yang dilakukan Pemda Aceh Besar sehingga menyebabkan ketidakberhasilan pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut. Kurangnya pendampingan menyebabkan rendahnya partisipasi pengrajin dan ketidakdisiplinan dalam melanjutkan usaha, serta ketiadaan modal untuk pengrajin karena re-focusing anggaran dari pemda membuat produksi terhambat pada masa Covid-19. Kesulitan mempromosikan dan lambatnya respon dari pemerintah dikarenakan kurang mengerti cara mengakses jaringan sosial media.

3. Langkah strategi meningkatkan pemberdayaan pengrajin tas sulam Aceh adalah Mempertahankan kualitas produk Kerajinan tas sulam Aceh. sehingga dapat mengambil peluang yang ada dan dapat meningkatkan keuntungan. Pengambilan alternatif strategi tersebut karena dalam mempertahankan kualitas produk kerajinan tas sulam Aceh diperlukan lokasi yang mendukung usaha dan peluang pasar yang luas. Meningkatkan produksi dan penjualan produk. Karena dengan adanya peningkatan produksi dan penjualan produk untuk menghadapi besarnya pesaing dan juga fluktuasi harga bahan baku akibat pandemi Covid-19. Meningkatkan promosi dalam pemasaran. Yaitu Memiliki mitra kerja dengan pihak lain dan adanya keberadaan atau bantuan lembaga pemerintah. Menggunakan teknologi yang lebih modern terutama dari finishing. Karena dengan

adanya teknologi yang lebih modern keadaan alam yang tidak menentu bisa teratasi.

Saran

Adapun saran atau rekomendasi yang dapat penulis sampaikan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pengrajin adalah :

1. Untuk Meningkatkan Pendapatan pengrajin Tas sulam, perlu di dukung oleh Dekranas Kab. Aceh Besar sebagai pendamping usaha, dan perlu bantuan modal usaha serta mesin jahit listrik yang modern untuk memperlancar produksi pengrajin sulam Aceh. Pemda Aceh Besar harus lebih serius dalam memperhatikan pengrajin Tas sulam Aceh, baik dalam peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan cara menggunakan teknologi yang lebih moderen, maupun dalam hal bantuan sarana dan prasarana produksi. Dan Perlu adanya perbaikan kebijakan dari pemerintah agar para pengrajin tas Aceh bisa terbantu dalam meningkatkan produktivitas dalam mengembangkan usahanya pada masa pandemi dan endemi.
2. Guna Meminimalisir hambatan terkait pemberdayaan masyarakat pengrajin dalam meningkatkan kesejahteraan sebaiknya dukungan pemerintah perlu dipertahankan melalui pelatihan-pelatihan pemberdayaan kreatifitas yang dapat dialokasikan lewat dana APBD Desa. Perlu tambahan pendampingan selain melibatkan Dekranas dan juga pendamping lokal yang dapat didanai lewat APBD Desa. Sebaiknya harus ada market online untuk menunjang penjualan tas sulam agar lebih moderen.
3. Mengoptimalkan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan

Dekranasda untuk melakukan pengawasan dalam menjaga persaingan yang transparan terhadap para pengrajin yang menekuni sulam Aceh dan menjaga jangan sampai bahan baku tas Sulam Aceh tidak terkontrol dengan baik disaat produksi tas Sulam Aceh semakin meningkat dan membaik. Bagi pemerintah daerah agar mendorong pihak terkait untuk melakukan inisiatif pembinaan-pembinaan dalam membantu pengrajin tas Aceh di Desa Dayah Daboh, seperti Universitas, perusahaan-perusahaan besar, KADIN dan asosiasi bisnis.

4. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan kesejahteraan di Gampong Dayah Daboh

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2014:56). Kesejahteraan Sosial (pekerjaan sosial, pembangunan sosial dan kajian pembangunan), Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Bambang. (1994:149-159). Hukum Dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Denhardt, R. B. (2009: 50-52.). Public Administration: An Action Orientation. Boston: Wadsworth.
- Dunn, W. N. (2000:222). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: UGM Press.
- Dwijowijoto, R. n. (2004:76). Kebijakan Publik. Jakarta: Gramedia.
- Dwijowijoto, R. N. (2004:87-98). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Dye, T. R. (1992:23-36). Understanding Public Policy. New Jersey: Englewood.
- Firmansyah, H. (2012). Ketercapaian Indikator Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) di Kota Banjarmasin. Jurnal Agribisnis Perdesaan.

- Fernandes Simangunsong. (2016), Metodologi Penelitian Pemerintah, Bandung : Alfabeta
- Ghozali. (2016:23). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Irfan, M. (2011:67). Policy Analysis : Seri monografi Kebijakan Publik. Malang: Universitas Brawijaya.
- Ismail, M. (2013:13). Buku Ajar Analisis Kebijakan Publik. Surabaya: Universitas Hang Tuah .
- Kuncoro, M. (2011). Metode Kuantitatif. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen: YKPN.
- LAN. (2017). Analisis Kebijakan Publik Modul Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III. Jakarta: LAN.
- Lifa Indri Astuti, H. M. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan (Studi Pada Desa Asmorobangun, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 11., Hal. 1886-1892 | 1886.
- Muhammad Hasan, M. A. (2018). Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Pustaka Taman Ilmu.
- Nyoman Sumaryadi. (2005:88). Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama.
- Setiawan, O. (2004:39). Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan . Jakarta: Balai Pustaka.
- Solichin. (2007:76). Evaluasi kebijakan Publik. Malang: UNIBRAW.
- Sugiyono. (2016:42). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, B. (2015:87). Metodologi Penelitian Hukum. Yogyakarta.
- Susilo, A. (2017:22). Proses Dalam Pembuatan Kebijakan Publik. Jakarta.
- Usman, N. (2002:70). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Grasindo.
- Wahhab, S. A. (2018:45). Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Wiliam N. Dunn. (2005:16). Kebijakan Publik dan Pengambilan Keputusan Edisi ke 4. Yogyakarta : Andi.
- Winarno, B. (2007:76-86). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo, .
- Yamulia Hulu, R. H. (2018: 146-154). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *urnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10 (1).

ANALISIS FRAMING MEDIA TERHADAP ISU PEMINDAHAN IBU KOTA BARU DI INDONESIA

Inrinofita Sari¹; Nurul Wahdaniyah² Asriadi³

^{1,3}Ilmu Pemerintahan, Universitas Pamulang, Banten

²Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta

email : dosen03013@unpam.ac.id

Paper Accepted: 20 Juni 2025
Paper Reviewed: 24-30 Juni 2025
Paper Edited: 01-08 Juli 2025
Paper Approved: 23 Juli 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis framing media terhadap isu pemindahan ibu kota baru di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian diambil dari data primer yaitu berita online media sedangkan untuk data sekunder dalam penelitian ini berupa artikel-artikel mengenai perpindahan ibu kota baru. dan melakukan pengolahan data dengan menggunakan fitur Ncapture pada Nvivo 12 plus. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan framing Robert N. Entman yang terdiri atas empat elemen yakni Define Problem (Pendefinisian Masalah), Diagnose Causes (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah), Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral), dan Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian). Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa lima media tersebut yaitu cncindonesia.com, detik.news, republika.com, kompas.com dan tempo.co dalam membingkai isu pemindahan ibu kota baru Indonesia menunjukkan bingkai yang berbeda, Mulai dari kuantitas berita yang dihasilkan, pada berbagai framing media tersebut telah mengungkap apa aja yang terdampak dari isu pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia seperti media kompas.com dalam pemberitaannya justru cenderung lebih mengkritisi kebijakan, lebih memberitakan informasi secara tegas terhadap pemindahan Ibu Kota, Tempo lebih menonjolkan sisi finansial, dimana Tempo mengangkat mengenai anggaran dalam pemindahan Ibu Kota, Detik lebih menonjolkan sisi sosial, CnbcIndonesia lebih membahas tentang pemerataan pembangunan dan Republika cenderung membela kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Kata Kunci : Framing Media, Isu, Pemindahan Ibu Kota

PENDAHULUAN

Pada 26 Agustus 2019 Presiden Republik Indonesia resmi mengumumkan rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, dalam keterangannya, telah memutuskan sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru Republik Indonesia (Mardiansyah et al., 2021).

Alasannya adalah karena resiko bencana yang minim, kawasan tersebut juga dinilai cukup strategis diantara kota-kota yang berkembang, yakni kota Balikpapan dan Samarinda. Dalam rencana pemindahan ibukota ini, diproyeksikan dapat menumbuhkan berbagai sektor di wilayah Kalimantan Timur (Hasibuan, 2019). Presiden juga menyatakan bahwa inilah lokasi yang paling ideal karena telah melalui dua kajian, yakni struktur tanah

dan dampak ekonomi. Disamping itu, banyak pakar yang menyatakan bahwa pemindahan ibu kota negara akan mendorong investasi ke provinsi ibu kota baru (Malisan et al., 2021). Pemerintah Republik Indonesia juga berpendapat Kalimantan Timur memiliki beberapa keunggulan seperti (1) Dua bandara internasional utama dekat dengan ibu kota (Sultan Aji Muhammad Sulaiman Bandara Internasional dan Aji Pangeran Tumenggung Pranoto), (2) Kalimantan Timur memiliki akses Tol Balikpapan-Samarinda yang membentang 99,35 kilometer (KM), (3) Calon ibu kota juga memiliki akses ke Pelabuhan Semayang, (4) Kalimantan Timur juga memiliki jaringan energi dan sumber daya air bersih, (5) Kalimantan Timur memiliki struktur demografi yang heterogen berarti sebagian besar penduduk Kalimantan Timur adalah pendatang dan mudah beradaptasi dengan perubahan (Nur Azhar et al., 2020).

Rencana ini ditetapkan untuk menggantikan Kota Jakarta yang sudah terlalu penuh, berpolusi, rentan banjir, macet lalu lintas, memiliki resiko bencana terutama gempa bumi, dan saat ini datarannya secara perlahan mulai tenggelam yang merupakan hasil penelitian berbagai pihak (Salsabila & Nurwati, 2020). Presiden menekankan bahwa ibu kota baru tersebut nantinya tak hanya berarti sebagai simbol identitas bangsa, tapi juga sebagai representasi kemajuan bangsa (Fikri, H., 2020). Alasan pemindahan adalah untuk mengurangi ketimpangan, pemeratakan pembangunan, dan menumbuhkan pusat ekonomi baru, selain karena alasan daya dukung dan daya tampung Pulau Jawa yang terus berkurang. Dalam perjalanan panjangnya sebagai ibukota sekaligus pusat pertumbuhan nasional, Jakarta telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia (Herdiawan, 2021). Pemindahan ibu kota sudah digulirkan sejak lama, bahkan sejak era kepemimpinan Presiden ke-1 Republik Indonesia Ir Soekarno namun keinginan itu belum juga dapat terealisasi (Framing et al., 2020). Sebelumnya, selama pemerintahan Soekarno, pemindahan ibu kota disebutkan ketika Soekarno meresmikan Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 1957. Pada tahun 1965, Soekarno juga menyebut Palangkaraya sebagai calon ibu

kota negara. Kemudian selama Era Suharto, ide pemindahan ibu kota muncul dengan mengusulkan daerah Jonggol, Bogor sebagai ibu kota negara. Beralih ke pemerintahan SBY pada Oktober 2010, saat itu Kali ini SBY menawarkan sejumlah opsi untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota Jakarta. Yaitu mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota dengan reformasi total, Jakarta tetap ibu kota, tetapi pusat pemerintahan telah dipindahkan ke daerah lain. (Azmy, 2021). Pemindahan Ibu kota baru ini diharapkan menjadi “kota yang cerdas, hijau, indah, dan berkelanjutan”, dengan menyediakan kualitas hidup yang tinggi untuk 1,5 juta penduduk yang diproyeksikan dengan ruang hijau yang luas, tidak seperti kepadatan penduduk dan menenggelamkan Jakarta (Teo et al., 2020).

Saat ini, pemerintah kembali membahas pemindahan ibu kota karena Jakarta dianggap tidak layak lagi menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Selain itu, letaknya yang lebih jauh ke bagian barat Indonesia dituding sebagai penyebab tingginya tingkat ketimpangan antar wilayah di tanah air. Oleh karena itu, saat ini sedang dibahas untuk membangun luar biasa mega proyek yaitu pemindahan ibu kota dari semula di kota Jakarta ke daerah lain yang dianggap lebih potensial dan memiliki daya dukung wilayah yang lebih baik (Sutoyo & Almaarif, 2020). Pemindahan ibu kota bukanlah Isu baru di Indonesia, dengan isu yang relatif sama yakni permasalahan lingkungan DKI Jakarta yang kelebihan muatan. Isu ini kembali ramai setelah Presiden Republik Indonesia terpilih (Hamdani, 2020). Adanya isu menarik ini tentunya terdapat berbagai pendapat dari berbagai pihak. Pro dan kontra tentu akan bermunculan seiring dengan adanya isu yang sedang hangat dibahas ini. Dengan perkembangan teknologi, isu pemindahan Ibu kota pun semakin meluas dengan cepat. Masyarakat kerap kali menggunakan media massa untuk memperoleh informasi. Dengan perkembangan teknologi, terciptalah internet sebagai salah satu cara mengakses “news media” atau media online (Pradyanti et al., 2020). Banyak diantara masyarakat yang mendukung penuh dengan keputusan pemerintah ini karena dilihat sebagai salah satu bentuk untuk mengistirahatkan Jakarta

yang dinilai sudah tidak mumpuni dan pemindahan ibu kota diharapkan membantu pembangunan infrastruktur sebagai salah satu misi pemerataan pembangunan Indonesia. Namun tidak sedikit juga masyarakat dari berbagai elemen menolak rencana hijrah ibu kota ini karena dianggap hanya menyulitkan keuangan negara (Mardhiyah, 2020). Perdebatan mulai terjadi mengenai berapa total anggaran yang dibutuhkan oleh pemerintah, hingga wajah Kota Jakarta kedepannya (Juniardi, 2019). Jika ibu kota dipindahkan, permasalahan yang akan muncul terkait permasalahan infrastruktur dan bagaimana jenis pengaturan nantinya, termasuk apabila pemindahan ibu kota dilakukan maka akan terjadi perubahan tatanan yang luar biasa (Yahya, 2018).

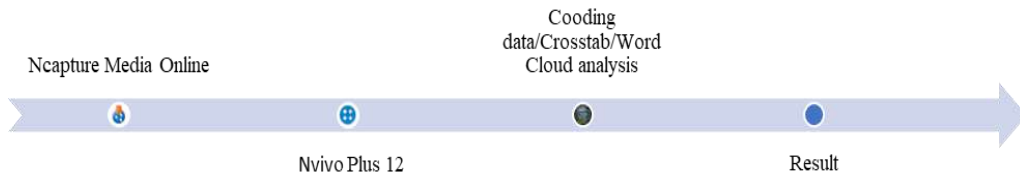
Wacana pemindahan merupakan bagian dari kepentingan bangsa dan sebagai upaya menyongsong persaingan global (Arsi & Waluyo, 2021). Isu pemindahan ini otomatis mendapat perhatian luas dari media, khususnya media online. Ratusan berita, komentar para ahli, pemerintah, dan masyarakat lokal tentang isu ini tersebar di media (Septiana, 2018). Banyak media mengangkat isu ini dan dikemas dengan tujuan tertentu. Berita tentang rencana pemindahan Ibu Kota baru akan dianalisis dengan framing. Analisis framing merupakan salah satu analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu berita (Adawiyah & Moefad, 2020). Media dengan mudah mengemas berita sedemikian menarik untuk disampaikan kepada masyarakat, entah untuk benar-benar memberikan informasi kepada masyarakat atau untuk mempertahankan ideologi media itu sendiri. Pada dasarnya, satu topik besar dapat diberitakan berbeda oleh beberapa media. Seperti itulah media mengemas berita. Tidak terkecuali yang dilakukan para media yang dipilih pada penelitian ini yaitu Kompas.com, Detik News, Republika, Cnbcindonesia.com dan Tempo.co. Peneliti memilih framing karena salah satu model analisis yang dapat mengungkapkan rahasia di balik semua perbedaan bahkan pertentangan media dalam mengungkapkan fakta. Melalui analisis framing akan dapat diketahui bagaimana realitas dibingkai oleh media. Pembingkaiannya tersebut tentu saja melalui proses konstruksi. Dengan demikian realitas sosial dapat

dipahami, dimaknai, dan dikonstruksi dengan bentuk dan makna tertentu. Dan alasan selanjutnya adalah peneliti ingin membandingkan pembingkaiannya pemberitaan di media Kompas.com, DetikNews, Republika, Cnbcindonesia.com dan Tempo.co kelima media tersebut mengangkat kasus berita tentang rencana pemindahan Ibu Kota pada masa pandemi dari berbagai aspek mulai dari kata maupun dari kalimat. Oleh sebab itu melalui penelitian ini penulis memandang perlu untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut karakter pemberitaan media Kompas.com, DetikNews, Republika, Cnbcindonesia.com dan Tempo.co dalam membingkai berita yang berkaitan dengan Pemindahan Ibu Kota Baru Indonesia, oleh karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Framing Media Terhadap Isu Pemindahan Ibu Kota Baru Indonesia.

METODE PENELITIAN :

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan cara mendeskripsikan temuan-temuan lewat media online. Metode dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dapat mendeskripsikan data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang terdapat dalam sebuah teks berita online media. Sumber data penelitian ini antara lain Media Online seperti media massa dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Isu Pemindahan Ibu Kota Baru. Data diperoleh dengan menggunakan fitur Ncapture pada Nvivo 12 plus dimana fitur N capture merupakan ekstensi web browser yang dikembangkan untuk menangkap konten web berupa konten website, media sosial, dan konten dokumen lainnya seperti artikel ilmiah dan koleksi pendapat para pengamat tentang framing media. Analisis Nvivo 12 plus menggunakan fitur analisis *cross-tab query*. Fitur ini untuk melihat persentase data berita yang telah di koding secara manual menggunakan fitur N Vivo 12 plus. Selanjutnya penulis menggunakan analisis *Word cloud* untuk melihat kata atau konsep yang sering muncul dalam file penelitian untuk memvisualisasikan dan mengumpulkan data/kata yang memiliki persamaan dan perbedaan.

Gambar 1. Langkah untuk mengambil data dan analisis



Berikut dapat kita lihat media yang di ambil sebagai sumber data

Tabel 3. Sumber Media Online

No	Media Online	Website	Jumlah berita
1	Cnbcindonesia	https://www.cnbcindonesia.com	16
2	Detik	https://www.detik.com	13
3	Republika	https://www.republika.co.id	16
4	Kompas	https://www.kompas.com	17
5	Tempo	https://www.tempo.co	18

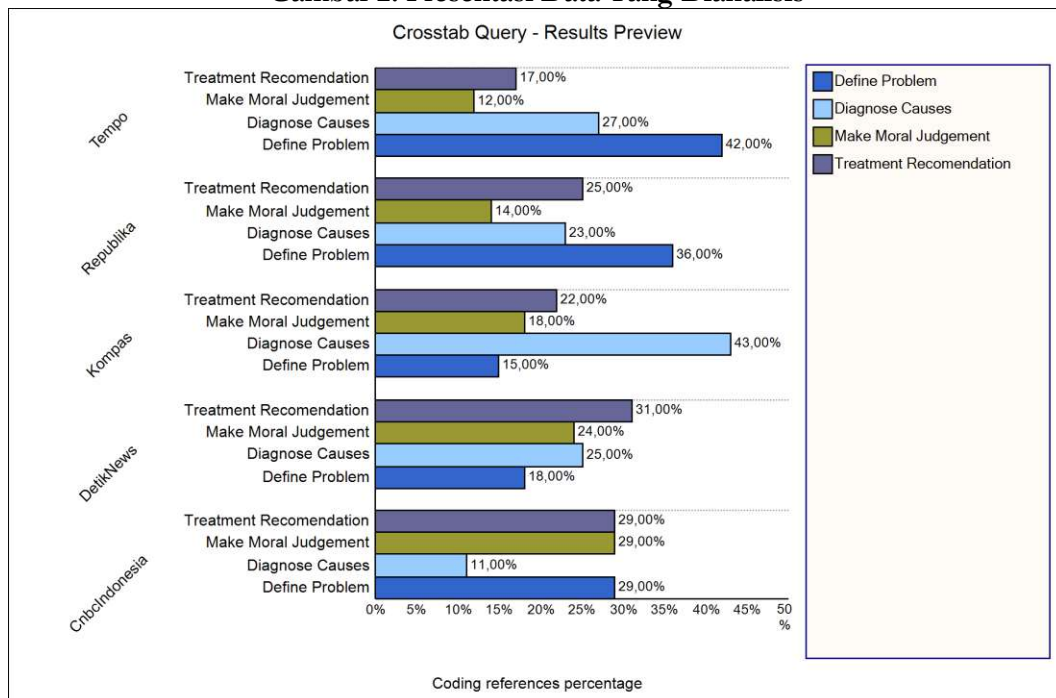
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada lima media online yang dianalisis oleh peneliti. Alasan dalam memilih lima berita online tersebut tentu dengan melihat dari segi kredibilitas media yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis FramingMedia

Analisis ini menggunakan lima media untuk melihat framingnya terhadap Isu Pemandangan Ibu Kota Baru. Kelima media itu adalah Cnbcindonesia.com, Detik.com, Republika.co.id, Kompas.com dan Tempo.co.

Gambar 2. Presentasi Data Yang Dianalisis



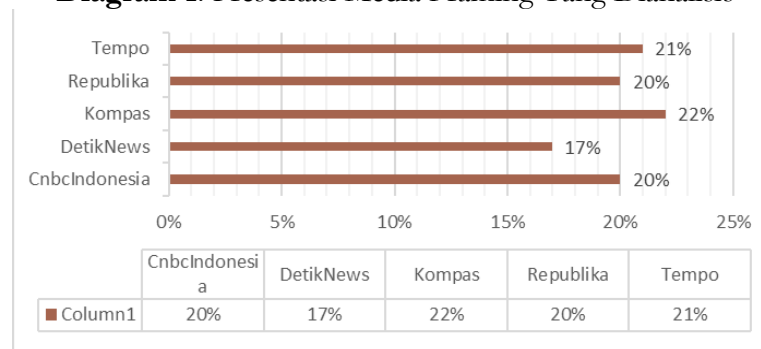
Media	Define Problem	Diagnose Causes	Make Moral Judgement	Treatment Recommendation
CnbcIndonesia	29,58%	11,27%	29,58%	29,58%
DetikNews	18,97%	25,86%	24,14%	31,03%
Kompas	15,56%	43,33%	18,89%	22,22%
Republika	36,36%	23,64%	14,55%	25,45%
Tempo	42,55%	27,66%	12,77%	17,02%
Total	26,79%	27,41%	20,56%	25,23%

Berdasarkan penyajian data diatas dapat kita analisis framing media terkait isu pemindahan ibu kota baru terdapat 80 berita, dari lima media diatas yang terkait isu pemindahan ibu kota. Dari 80 berita yang dianalisis dapat dilihat bahwa media Tempo mendefinisikan suatu masalah itu 42% dari sekian berita, tempo yang paling banyak memberitakan isu pemindahan ibu kota dimana media tempo membahas Anggaran Pemindahan Ibu Kota Nihil, dilihat paparan Menteri Keuangan, anggaran infrastruktur pada tahun 2022 dialokasikan Rp 384,8 triliun. pemberitaan yang dimuat dapat dimasukkan ke dalam beberapa kategori yaitu nilai moral bahwa: Menjadi strategi pemulihan ekonomi nasional, acuan standar baru ibu kota dunia, menjadi cawan bagi ledakan kelahiran inovasi teknologi anak bangsa, dan menjadi pusat keuangan regional dan dunia yang baru. Penilaian moral lainnya yang juga dapat ditelaah yaitu terkait bukan sekedar pindah lokasi, tetapi ada sebuah transformasi progresif dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru yang berprinsip pada indonesiasentris, yakni pemerataan pembangunan diseluruh Indonesia, kemudian

Kebijakan yang akan dipilih pemerintah yaitu percepatan penyelesaian proyek infrastruktur yang tertunda akibat pandemi, dan program pemindahan ibu kota tidak masuk di dalamnya. Sementara itu Kompas pada

Diagnose Causes sebesar 43%, Pada pemberitaan di laman Kompas.com dapat diketahui bahwa mayoritas yang diberitakan adalah alasan pemerintah yang ingin memindahkan ibu kota negara kekalimantan timur. Berdasarkan identifikasi Make Moral Judgement di atas berdasarkan laman portal berita CnbcIndonesia.com 29% dalam perlindungan lingkungan dalam menghadapi perubahan, kualitas baru tata kelola pemerintahan, dan transformasi dan menyeluruh kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Treatment Recommendation yang dibingkai oleh media Detiknews 31% memperlihatkan bahwa Rencana pemindahan ibu kota negara sendiri telah masuk dalam rencana kerja Bappenas 2022. Rancangan Undang-undang (RUU) IKN disebut telah siap, namun permasalahannya kondisi yang mengharuskan adaptasi dengan pandemi COVID-19.

Diagram 1: Presentasi Media Framing Yang Dianalisis



Source: Processed By Researchers Using The N Vivo Application

CnbcIndonesia dengan 96 count, Detik dengan 112 count, Kompas dengan 275 count, Republika dengan 148 count dan Tempo dengan 185 count. Hal ini menandakan bahwa dimensi spasial menjadi aspek penting dalam konstruksi berita, yang berkaitan erat dengan isu pemindahan ibu kota negara (IKN), proyek pembangunan wilayah, atau sentralisasi kegiatan ekonomi dan pemerintahan.

Selain dominasi kata yang berkaitan dengan nama kota, terlihat pula bahwa kata "IKN" (Ibu Kota Negara) muncul sebagai salah satu kata dengan frekuensi tinggi dalam hampir seluruh media yang dianalisis. Ini menunjukkan bahwa isu pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan agenda besar yang secara konsisten diframing oleh media. Kata "IKN" tidak hanya hadir sebagai representasi lokasi, tetapi juga sebagai simbol naratif yang mengandung beragam makna politik, ekonomi, dan pembangunan. Kata ini muncul bersama kata-kata lain yang secara semantik mengarah pada narasi seperti pembangunan berkelanjutan, pemulihan ekonomi, transformasi wilayah, hingga RUU IKN.

Framing media terhadap isu pemindahan ibu kota tidak hanya terbatas pada pelaporan faktual, melainkan mencerminkan konstruksi naratif yang lebih luas. Media secara tidak langsung mengafirmasi proyek IKN sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat pemerataan pembangunan, meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta mempercepat pemulihan pasca pandemi melalui stimulus infrastruktur.

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lima media tersebut yaitu cnbcindonesia.com, detik.news, republika.com, kompas.com dan tempo.co dalam membingkai isu pemindahan ibu kota baru indonesia menunjukkan bingkai yang

berbeda pula ditunjukkannya melalui teks-teks yang dihasilkan oleh media, Mulai dari kuantitas berita yang dihasilkan, pada berbagai framing media tersebut telah mengungkap apa aja yang terdampak dari isu pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia seperti pemulihan ekonomi, pembangunan yang berkelanjutan, dan yang mana framing media yang paling banyak mengungkap perihal isu tersebut yaitu Media Kompas. Hasil framing terlihat bahwa sikap Kompas.com dalam pemberitaannya justru cenderung lebih mengkritisi kebijakan, lebih memberitakan informasi secara tegas, dimana Kompas mempertanyakan alasan pemerintah yang ingin memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Framing Tempo.co.id dalam pemindahan ibu kota lebih menonjolkan sisi finansial, terlihat dari bagaimana Tempo.co.id mengangkat mengenai anggaran dan dana lainnya dalam pemindahan ibu kota baru. Framing Detik.news dalam peristiwa ini lebih menonjolkan sisi sosial, terlihat bagaimana Detik mengangkat mengenai pemerintah yang pro terhadap penanganan covid-19 di Indonesia. Framing Cnbc.Indonesia.com dalam peristiwa pemindahan ibu kota lebih menonjolkan pemerataan pembangunan kemudian perlindungan lingkungan dalam menghadapi perubahan, kualitas baru tata kelola pemerintahan, dan transformasi dan menyeluruh kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Framing Republika.co.id dalam peristiwa cenderung membela kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini lebih menonjolkan bahwa dukungan para partai dibutuhkan dalam pemindahan ibu kota baru.

DAFTAR PUSTAKA

Adawiyah, D. P. R., & Moefad, A. M. (2020). Konstruksi Realitas Dan Framing Analysis Pemberitaan Kerusakan Muslim-Hindu Di India Pada Media Online Cnn.Com. *ORASI: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 11(2), 149.

- <https://doi.org/10.24235/orasi.v11i2.6601>
- Anggraeni, D. (2018). Analisis Framing Entman Berita Tata Kelola Pangan di Media Online. *Jurnal The Messenger*, 10(1), 113–114.
<http://journals.usm.ac.id/index.php/the-messenger/article/view/711>
- Arsi, P., & Waluyo, R. (2021). Analisis Sentimen Wacana Pemindahan Ibu Kota Indonesia Menggunakan Algoritma Support Vector Machine (SVM). *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 8(1), 147.
<https://doi.org/10.25126/jtiik.0813944>
- Azmy, A. S. (2021). Examining the Relocation of the Capital City of Indonesia Through the State Perspective in Political Economy. *Polit Journal: Scientific Journal of Politics*, 1(1), 26–35.
<https://doi.org/10.33258/polit.v1i1.365>
- Cabucci, M. O., & Maulina, P. (2021). Analisis Framing Pemberitaan Kebakaran Hutan Di An Lahan Pt . Agro Sinergi Nusantara Pada Media Online. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 5, 205–216.
- Damayanti, S., Putra, D. K. S., & Mayangsari, I. D. (2016). Analisis Framing Robert N. Entman atas Pemberitaan Reklamasi Teluk Jakarta di Majalah Tempo. *E-Proceeding of Management*, 3(3), 3928–3936.
<https://libraryproceeding.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/3785>
- Fikri, H., R. R. (2020). Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi The Relocation of Indonesia ' s Capital City and the Presidential Powers in Constitutional Perspective. *Jurnal Konstitusi*, 17(17(3)), 531–557.
- Framing, A., Pan, Z., Pada, M. K., Online, M., & Putri, F. N. (2020). *PANDEMI COVID-19*. 19.
- Hamdani, R. S. (2020). Proyek Lintas Batas Administrasi: Analisis Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 4(1), 43–62.
<https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.1.43-62>
- Handariastuti, R., Abidin Achmad, Z., & Bramayudha, A. (2020). Analisis Framing Berita Pemberhentian PSBB Surabaya Raya di Media Online kompas.com dan suarasurabaya.net. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 156–176.
<https://doi.org/10.15642/jik.2020.10.2.156-176>
- Hasibuan, R. R. A. (2019). Dampak Dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi Di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 53(9), 1689–1699.
- Herdiawan, J. (2021). Dimensi Etis Pemindahan Ibu Kota Negara: Masalah Ketimpangan Sosial dan Lingkungan dalam Ruang Perkotaan menurut David Harvey. *Jurnal Dekonstruksi*, 3(1), 4–23.
<http://jurnaldekonstruksi.id/index.php/dekonstruksi/article/view/44>
- Juniardi, H. S. (2019). *Analisis Framing Pemberitaan Pemindahan Ibu Kota pada Pemerintahan Presiden SBY dan Presiden Jokowi pada Media Online Kompas.com*.
<http://eprints.ums.ac.id/89299/>
- Komara, E., & Kusnianti, E. (2019). Analisis Bingkai Pemberitaan Konflik Israel di Koran Republika. *Media Komunika (Jurnal Komunikasi)*, 4(2), 18.
- Malik, R. K. (2019). Polemik Hijab Miftahul

- Jannah Di Asian Para Games 2018 (Analisis Framing Robert N. Entman di Media Online: TribunNews.com, Detik.com, dan Republika.co.id). *Kalijaga Journal of Communication*, 8(1), 274–282.
- Malisan, J., Sujarwanto, S., Arief, B., & ... (2021). Kajian Pengembangan Pelabuhan Dalam Mendukung Ibu Kota Baru Berdasarkan Konsep Smart City, Smart Mobility. *Jurnal Sistem ...*, 2018, 6–13.
<https://journal.itltrisakti.ac.id/index.php/jstl/article/view/628>
- Mardhiyah, T. A. (2020). *Wacana Pemindahan Ibu Kota di Media Sosial (Analisis Wacana Kritis Model Teun A . Van Dijk Pada Youtube Kumparan)*.
<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/7439/>
- Mardiansyah, M. R., Studi, P., Politik, I., Ilmu, F., Politik, S. D. A. N., & Palembang, R. F. (2021). *Pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia*.
- Muhammad Rizal. (2021). Analisis Framing Pemberitaan Politik Capres dan Cawapres di Media Sosial pada Akun Detik. com. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 2013–2015.
- Nur Azhar, H., Putri Fatima, H. H., & Tamas, I. N. (2020). Preliminary study of Indonesia capital city relocation based on disaster mitigation principle with mental model approach. *E3S Web of Conferences*, 148, 1–7.
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202014806002>
- Pradyanti, A., Venus, A., & Mahdalena, V. (2020). Framing News About Indonesian Capital City Translocation By Online Media Okezone.Com and Viva.Co.Id. *Journal of Digital Education, Communication, and Arts (Deca)*, 3(02), 124–134.
<https://doi.org/10.30871/deca.v3i2.2242>
- Rachman, M. A. (2016). Analisis Framing Pemberitaan Penahanan Suryadharma Ali Di Kompas. Com (Periode Juni 2015). *EJournal Ilmu Komunikasi*, 2016, 4(2): 127 - 141, 4(2), 127–141.
[https://ejournal.ikom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/05/Jurnal_05-26-16-01-36-36\).pdf](https://ejournal.ikom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/05/Jurnal_05-26-16-01-36-36).pdf)
- Sakinah, V. N. (2019). *Pembingkajian Berita Revisi UU KPK Tahun 2019 Di Media Online (Analisis Framing Robert M . Entman Di Kompas . com Periode 22 – 25 September 2019) Vinny Nur Sakinah Laksmi Rachmaria Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Lubur. September.*
- Salsabila, A. H., & Nurwati, N. (2020). Deforestasi Dan Migrasi Penduduk Ke Ibu Kota Baru Kalimantan Timur: Peran Sinergis Pemerintah Dan Masyarakat. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 27.
<https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28259>
- Sinaga, K. C. S. (2016). Analisis Framing Pemberitaan Bom Sarinah di Kompas.com dan Merdeka.com. *Jom Fisip*, 3(2), 1–12.
- Teo, H. C., Lechner, A. M., Sagala, S., & Campos-Arceiz, A. (2020). Environmental impacts of planned capitals and lessons for Indonesia's new capital. *Land*, 9(11), 1–17.
<https://doi.org/10.3390/land9110438>
- Wijanarko, Y. A. (2007). Analisis Framing Pemberitaan Deklarasi Pencapresan Jokowi di Media Massa. *Jurnal*

Komunikasi Massa, 9.

Yahya, M. (2018). Pindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 14(1), 21. <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.779>

ISSN 2798-9186



Jurnal Adhikari

Website Jurnal

<https://www.jurnal-adhikari.id/index.php/adhikari>